

WIRA



Dwi
Bahasa
Indonesia
Inggris

www.dmc.kemhan.go.id
www.kemhan.go.id

ISSN 1693-0231



Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim

JAKARTA INTERNATIONAL DEFENCE DIALOGUE

"BUILDING MARITIME COLLABORATION
FOR SECURITY AND STABILITY"

March 19 - 20, 2014, Jakarta - Indonesia



Ministry of Defence
Republic of Indonesia



Ministry of Foreign Affairs
Republic of Indonesia



Indonesia
Defence University

*Indonesia "Zero Drugs"
Campaign*

*Preparing capable Defence
Industry*

Indonesia operates Air Force One





Serambi Redaksi

Pembaca WIRA yang budiman,

Salam hangat dari Redaksi WIRA, semoga pembaca selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.

Jakarta Internasional Defence Dialogue (JIDD) ke-4, maret lalu merupakan ajang Dialog Informal Internasional tahunan yang membahas isu-isu penting seputar pertahanan dan keamanan, yang mencakup Negara ASEAN serta Eropa dan Afrika. Forum seminar pertahanan ke-4 itu berlangsung 19-20 Maret 2014 dan diikuti 50 negara yang membahas isu tentang eksplorasi Indo-Pasific, mengelola perairan maritim, mengatasi permasalahan ancaman non-tradisional, modernisasi dan stabilitas kekuatan militer serta memperkuat kerjasama hukum dan diplomasi di wilayah perairan. Wapres Boediono sendiri yang membuka forum JIDD tersebut dalam sambutannya menjelaskan penyelenggaraan JIDD keempat ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negeri yang di anugerahi wilayah laut yang luas, Indonesia wajib mengembangkan kapabilitas militernya serta sekaligus meningkatkan kerjasama maritim sebagai kebijakan prioritas.

Dalam JIDD ke-4 juga diadakan "Asia Pasific Security and Defence Expo" (APSDEX) 2014 yaitu Pameran Industri Pertahanan dan Keamanan yang diikuti industri dalam negeri, tema APSDEX adalah "Driving Indonesian Industries and Partnership In Support of Regional Maritime Collaborations".

Lembaran utama edisi Maret-April 2014 ini, Tim Redaksi telah menyiapkan laporan khusus JIDD beserta serba-serbi di balik Pameran APSDEX 2014. Selain itu, kami juga menyajikan rubrik-rubrik opini yang akan memperkaya wawasan pengetahuan anda.

Para pembaca WIRA yang kami banggakan, kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar WIRA dapat tampil lebih baik lagi. Akhir kata, semoga sajian Tim Redaksi ini dapat memperkaya informasi bagi para pembaca yang budiman, selamat membaca.

Editorial Forward

Dear Readers,

Warm greetings from the Editor, may the reader be in good health and happy.

The 4th Jakarta International Defence Dialogue (JIDD), last March an annual international event Informal dialogue that addresses important issues surrounding the Defence and security, which includes ASEAN countries as well as Europe and Africa. the 4th Defence seminars that lasted 19 to 20 March, 2014 and attended by 50 delegation who discussed the issue of Indo-Pacific exploration, managing maritime waters, to overcome the problems of non-traditional threats, modernization and military stability and strengthening cooperation in the area of law and teritorial waters diplomacy. The vice president himself who opened the forum JIDD in his speech explained the implementation of the fourth JIDD is very important for Indonesia as the country given vast sea area, Indonesia shall develop its military capabilities while improving maritime cooperation as well as priorities policy.

Within the 4th JIDD is also held "Asia Pacific Security and Defence Expo" (APSDEX) in 2014 that Defence and Security Industry Exhibition which followed by the domestic industry, the APSDEX theme is "Driving Indonesian Industries and Partnership in Support of Regional Maritime Collaborations".

The main issue of this March to April 2014 edition, from Editorial Team has prepared a special JIDD report along with behind APSDEX Exhibition 2014 coverages. Besides, we also provide opinion rubrics that will enrich your knowledge.

WIRA readers, we always welcome any suggestions and criticisms from you so WIRA could perform better. Finally, we hope this edition coverages from the Editorial Team will enrich the reader information, enjoy reading.

redaksi.wira@yahoo.com

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Sekjen Kemhan
Kapuskom Publik Kemhan

Pemimpin Redaksi:

Kolonel Laut (KH) M. Adnan Madjid

Wakil Redaksi:

Drs. Zul Asril

Redaksi:

Letkol Sus Trisatya W, M.IT
Sri Murtiana, S.Sos, M.M
Letkol Caj Fajar Joko Sulisty, MA
Deden Deni Doris, S.E
Mayor Inf Barnes M, M. Sc
Mutiara Silaen, S.Ikom
Dyah Ayu Setyorini

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom
Eko Prasetyo, S.Kom
Imam Rosyadi

Fotografi:

M. Adi Wibowo

Percetakan & Sirkulasi:

Neneng Herlina, S. Sos. M.M
Nadia Maretti, S.Kom

Diterbitkan Oleh:

Puskom Publik Kemhan

daftar isi

Laporan Utama

6

Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim Melalui JIDD

establishing Maritime Security cooperation through JIDD



12

Fokus

Peran Kebudayaan dalam mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

the Role of Culture in Achieving Independence of the Defense Industry

14

Terkini

Indonesia memiliki Pesawat Kepresidenan

Indonesian Operates Air Force One



the content

Opini

Pengelolaan dan pengembangan Industri
Pertahanan

22

Management and development of Defence Industry

Menyiapkan Industri Pertahanan yang
mumpuni

32

Preparing capable Defence Industry

Pengembangan Industri Pertahanan dalam
mendukung pertahanan negara

52

*Industrial development in Support of State
Defence*

Kerjasama Pertahanan

Indonesia mencanangkan Zero Narkoba

56

Indonesia "Zero Drugs" Campaign



EDITORIAL BOARD

Patron/Advisor:

Defense Minister

Sec. Gen. of Defense Ministry

Head of Public Communication Center

Chief Editor:

Colonel M. Adnan Madjid

Vice Editor:

Drs. Zul Asril

Editorial:

Lieutenant Colonel Trisatya W, M. IT

Sri Murtiana, S.Sos, M.M

Lieutenant Colonel Fajar Joko
Sulistyo, MA

Deden Deni Doris, S.E

Major Barnes Mahardika, M. Sc

Mutiara Silaen, S.Ikom

Dyah Ayu Setyorini

Graphic Design:

First Lieutenant Farah M.S, S.Kom

Eko Prasetyo, S. Kom

Imam Rosyadi

Photografer:

M. Adi Wibowo

Printing & Circulation

Nadia Maretti, S.Kom

Published By:

Public Communication Center

Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

Upaya Membangun Kerjasama Keamanan Maritim melalui JIDD (Jakarta International Defence Dialogue)

JAKARTA INTERNATIONAL
DEFENCE DIALOGUE 2014

"BUILDING MARITIME COLLABORATION
FOR SECURITY AND STABILITY"

March 19 - 20, 2014, Jakarta - Indonesia

OPENING CEREMONY



Bagian I

Universitas Pertahanan Indonesia dengan didukung penuh oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) Ke-4 pada 19 dan 20 Maret 2014 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono. JIDD ke-4 kali ini dengan tema "Building Maritime Collaboration for Security and Stability" (Membangun Kolaborasi Maritim untuk Stabilitas dan Keamanan) akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Sebanyak 50 Delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, Tiongkok, India, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain dari Eropa dan Afrika ikut menghadiri dan mengikuti forum JIDD ini. Forum pertemuan JIDD ke-4 ini mengupas isu-isu terkini mengenai tantangan keamanan maritim untuk mendorong peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam menyelesaikan permasalahan maritim. Seperti kita ketahui bersama bahwa keamanan maritim dengan permasalahan yang rumit, membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar

negara serta badan-badan regional dan internasional. Selain itu juga dibutuhkan suatu aturan perdagangan dan keimigrasian yang jelas, serta pengerahan kekuatan militer di wilayah perairan guna memperketat keamanan maritim. Kerjasama dibidang maritim bukan hanya menjadi kepentingan nasional masing-masing negara saja, tetapi juga dalam upaya menciptakan dunia yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang timbul atau yang berasal dari permasalahan lintas batas laut.

Sejatinya tujuan utama dari penyelenggaraan JIDD adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam mengatasi ancaman dan tantangan di bidang pertahanan dan keamanan. Penyelenggara berusaha untuk menyediakan forum bagi para pejabat dan ahli untuk membahas tren yang sedang berkembang di wilayah Asia Pasifik saat ini. Menteri Pertahanan Yudiantoro menjelaskan bahwa wilayah laut adalah pusat geostrategis Asia Pasifik, yang berpotensi mempersatukan namun juga dapat berpotensi menjadi sumber perselisihan di antara negara-negara Asia Pasifik.

Part I

Indonesian Defense University fully supported by the Ministry of Defense and Ministry of Foreign Affairs organized the 14th Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) on 19 - 20 March 2014 which was opened by Vice President Boediono. The theme of the 4th JIDD was "Building Collaboration for Maritime Security and Stability" held at the Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

A total of 50 Delegations from ASEAN countries, China, India, Australia, United States, and other countries of Europe and Africa attended the forum and follow this JIDD. The 4th JIDD forum discussed issues concerning maritime security challenges with the main objective to promote bilateral and multilateral cooperation in solving maritime problems. The maritime security with complex issues, requires cooperation among countries along with regional and international bodies. Besides it also requires a clear trade and immigration rules, and the deployment of military forces in the waters in order to tighten the maritime security. Cooperation in the field of maritime is not only become a national interest of each country, but also in an effort to create a more secure and protected world from threats arising from marine transboundary issues.

Indeed the main purpose of organizing JIDD is to improve cooperation among countries in addressing the threats and challenges in the field of defense and security. The Committee seek to provide a forum for officials and experts to discuss current emerging trends in the Asia-Pacific region. Defense Minister Purnomo Yusgiantoro explained that the sea is Asia Pacific central geostrategic, which has the potential to unite but also can potentially be a source of disagreement among Asia-Pacific countries. This forum is to encourage positive contributions of marine areas in International trade expansion, increased mobility of people in the region and in order to meet the increasing demands for the fulfillment of basic human needs.

In contrast, marine areas also play a negative role in the spread of organized transnational crime and other non-traditional security threats, such as the conflict among countries in the marine border areas. The thing to do is to effectively address the maritime problems and other complex issues that require collaboration among Asia-Pacific countries and regional institutions.

The JIDD activities aimed at bringing the nation's leaders, military leaders, academics, and policy makers to sit together and discuss efforts to strengthen the

Establishing Maritime Security Cooperation through JIDD (Jakarta International Defense Dialogue)



Forum ini mendorong kontribusi positif wilayah laut dalam perluasan perdagangan Internasional, peningkatan mobilitas masyarakat di kawasan serta dalam rangka mencukupi peningkatan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Sebaliknya, wilayah laut juga berperan negatif dalam penyebaran kejahatan transnasional terorganisir dan ancaman keamanan non tradisional, seperti konflik wilayah perbatasan antar negara di perairan. Hal yang harus dilakukan adalah secara efektif mengatasi permasalahan maritim serta permasalahan rumit lainnya yang membutuhkan kolaborasi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan institusi-institusi regional.

Kegiatan JIDD bertujuan mengajak pemimpin-pemimpin negara, petinggi militer, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk duduk bersama, dan mendiskusikan upaya memperkuat harmonisasi prioritas keamanan dan strategi masing-masing negara. JIDD juga bertujuan untuk meningkatkan dialog dan keterlibatan antara angkatan bersenjata di negara-negara peserta demi masa depan stabilitas keamanan wilayah.

Konferensi JIDD ke-4 ini mengangkat lima tema yaitu Eksplorasi Indo-Pasifik, mengelola permasalahan perairan, mengatasi permasalahan ancaman non tradisional, modernisasi dan stabilitas kekuatan militer, dan memperkuat kerjasama hukum dan diplomasi di wilayah perairan.

Eksplorasi Indo-Pasifik

Indo-Pasifik merupakan wilayah segitiga yang meliputi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dibatasi oleh Jepang di sebelah utara, Australia di tenggara, dan India di sebelah barat daya. Posisi Indonesia berada di tengah-

tengah segitiga tersebut, secara geostrategis, mencakup Samudera Pasifik dan Hindia dimana didalamnya terdapat kepentingan Tiongkok dan India, serta usaha strategis dan kehadiran berkelanjutan militer Amerika Serikat. Meski sebutan Indo-Pasifik baru timbul akhir-akhir ini, namun terminologi ini sebenarnya sudah lama dikenal; yaitu suatu istilah untuk mengidentifikasi orang-orang Indonesia / "Indo-Pacific Islanders".

Alur laut wilayah Indo-Pasifik berfungsi sebagai jalan pelintasan utama sumber daya energi yang merupakan pendorong ekonomi terbesar di dunia. Hampir 68% minyak India, 80% minyak Tiongkok, dan 62% minyak Amerika dikirim dari kawasan ini. Sedangkan untuk memperdagangkan minyak ini harus melalui choke point. Tiga "pintu masuk" kawasan Asia Tenggara - Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok - merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia. Ia menjadi sama pentingnya karena perselisihan politis dan ekonomis mengenai jalur laut yang melintasi kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Selat Malaka merupakan selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, sekaligus sebagai jalur terpendek yang terletak di antara India, Tiongkok dan Indonesia. Walaupun akar Indo-Pasifik adalah ekonomi, tetapi konsekuensi implikasi strategi dan manajemen negara-negara di dalamnya membuat Indo-Pasifik menjadi kompleks. Sehingga, Indo-Pasifik bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga kompetisi, kepentingan, keamanan, dan eksploitasi lingkungan.

Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan kawasan perdagangan dengan volume yang tinggi dari negara Jepang, Korea, Taiwan, dan Australia, termasuk impor minyak. Transit Sea-lanes of Communications (SLOCs) negara-negara tersebut berada di Asia Tenggara. Sedangkan dalam perspektif militer, jalur laut Asia



harmonization of security priorities and strategies of each country. JIDD also aims to increase dialogue and the engagement among armed forces of participating countries for the future of region's stability.

The 4th JIDD Conference raised five themes, namely Exploration Indo-Pacific, managing water problems, addressing problems of non-traditional threats, modernization and military stability, and strengthen cooperation in the area of law and diplomacy waters.

Exploration of Indo-Pacific

Indo-Pacific is a region refers to the concentration triangle that covers the Pacific Ocean and the Indian Ocean, bordered by Japan in the north, Australia in southeastern, and India in the southwest. Indonesia's position is in the middle of the triangle. Geostrategically, Indo-Pacific is a maritime strategy system that includes Pacific and Indian Oceans in which there are the interests of China and India, as well as strategic efforts and sustained US military presence. Even though the designation Indo-Pacific arise lately, but this terminology in fact is long known; which is a term to identify the Indonesian / "Indo-Pacific Islanders".

Sea lanes of Indo-Pacific region serves as a main crossing road of energy sources which is the world's largest economic drivers. Nearly 68% of India's oil, 80% of Tiongkok's oil and 62% of American oil shipped from this region. As for the oil trade must pass through the narrow strait (choke points). Three "entrance" of Southeast Asia region - Straits of Malacca, the Sunda Strait and

the Lombok Strait – is an important point in the world trading system. It becomes equally important because of political and economic disputes regarding sea lanes that cross spartly islands in the South China Sea. Malacca Strait is the strait which connects the Indian Ocean to the Pacific Ocean, as well as the shortest path that lies between India, China and Indonesia. Even though the root of Indo-Pacific is economies, but the consequences of strategic implications and management of the countries in it makes Indo-Pacific become complex. Thus, the Indo-Pacific is not just about trade, but also competition, interest, security, and environmental exploitation.

Economically, Southeast Asia is part of the trade with high volume from Japan, Korea, Taiwan, and Australia, including oil imports, transit Sea-lanes of Communications (SLOCs) of these countries in Southeast Asia. While in the military perspective, the sea lanes of Southeast Asia are very important for the movement of the US Armed Forces from the western Pacific to Indian Ocean. Therefore, it is important to establish cooperation in the field of Sea-lanes Communications (SLOCs) among Indo-Pacific countries to avoid misunderstandings and disputes of the lanes. SLOCs are an extensive communication lines for shipping transportation. The connection of extensive communication lines exists between the port terminals with ships passing international shipping route or between ships. The crowded of shipping lanes can be seen through the busy of the communication that occurs by using radiophone or radiograph between ships or between port terminal with ships.

PT. WAHGO INTERNATIONAL

Office : Jl. Veteran I No. 2-5, Jakarta Pusat 10110 - Indonesia, Tel. (+62-21) 3810888 / 3844181, Fax. (+62-21) 3844294
E-mail : wahgo.intl.2008@gmail.com



BARRETT COMMUNICATIONS
Design, manufactures and markets HF and VHF radio equipment for specialised, autonomous, long distance radio communication.



DICOM Manufacturer of Full Military NATO Standard Radio Communication Equipment.



T-CZ
Airport Radar and Radiocommunications Systems
T-CZ Company is a specialist in AIRPORT RADAR SYSTEMS, Surveillance and Precision Approach Radar System.



Kyodo
Specialist in Communication System Integration, Interoperability System and Encryption.



KENWOOD RADIO COMMUNICATIONS
NXDN and P25 Series of Digital Transceiver with IP Based Net.



URC Systems
Electronic Warfare System

Tenggara sangat penting untuk pergerakan Angkatan Bersenjata AS dari Pasifik Barat ke Samudra Hindia. Oleh sebab itu dirasakan pentingnya membangun kerjasama Sea-lanes Communications (SLOCs) negara-negara kawasan Indo-Pasifik guna menghindari kesalahpahaman dan perselisihan jalur transportasi pelayaran kawasan tersebut. SLOCs merupakan jalur komunikasi yang luas untuk transportasi pelayaran. Hubungan komunikasi yang luas terjalin antara terminal pelabuhan dengan kapal-kapal yang melewati rute pelayaran internasional maupun antar kapal. Ramainya jalur pelayaran suatu perairan dapat dilihat melalui sibuknya komunikasi yang terjadi dengan menggunakan radiograph atau radio phone antarkapal maupun antar terminal pelabuhan dengan kapal.

Bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke Asia mengakibatkan hubungan politik, diplomasi dan militer dikawasan menjadi sangat dinamis, mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) fokus ke Asia-Pasifik (pivot to Asia), dan akan memproyeksikan 60% kekuatan militernya ke Asia, sehingga mendapat reaksi dari Tiongkok. Munculnya ide pembentukan Indo-Pacific Power yang diprakarsai oleh AS, Jepang, dan Australia (serta berusaha menarik India) akan semakin menyulut reaksi Tiongkok. Konsekuensi dari meningkatnya ketegangan politik AS-Tiongkok menjadikan hubungan antar negara dikawasan terpolarisasi, dan lebih jauh berdampak pada eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, maupun konflik di Semenanjung Korea yang semakin meningkat. Secara garis besar ada dua kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pertama: Asia Tenggara membuka garis laut, karena sebagian besar perdagangan dunia melewati selat Malaka. Kedua: Asia Tenggara penting sebagai pos untuk pergerakan kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik Barat dan Samudera Hindia.

Penyeimbangan kembali AS atas Asia Pasifik merupakan suatu perubahan mendasar dalam strategi pertahanan AS. Bersamaan dengan penyeimbangan kembali AS, kebangkitan Tiongkok akan menjadi faktor sentral dalam bentang keamanan di Asia Pasifik. Beberapa pihak di Asia Tenggara prihatin bahwa penyeimbangan kembali AS dapat memecah negara ASEAN berdasarkan persepsi ancaman mereka terhadap Tiongkok. Garis pemisah ini dapat berupa apakah suatu negara memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok atau tidak. Bagi negara-negara penuntut, Amerika Serikat diharapkan untuk memainkan peranan "penyeimbang" Filipina, misalnya, telah aktif dalam menggalang dukungan AS dalam bentuk latihan militer gabungan dan transfer senjata.

Tanggapan dari negara-negara ASEAN atas keterlibatan kembali AS di Asia Pasifik berbeda-beda. Meskipun penyeimbangan kembali AS berguna sebagai pengaruh terhadap Beijing, namun ASEAN juga berkepentingan untuk mengambil manfaat dari pengembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang tumbuh dengan cepat. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik melakukan upaya modernisasi kekuatan militernya. Sebagai salah satu konsekuensi meningkatnya kesejahteraan nasional, beberapa Negara di kawasan telah menggunakan kesempatan tersebut untuk

menambah anggaran belanja pertahanan dalam rangka meningkatkan kapabilitas kekuatan pertahanannya. Alasan lain dari beberapa negara melakukan modernisasi kekuatan militernya dikarenakan adanya beberapa wilayah di dunia dan di kawasan yang masih menyimpan potensi konflik. Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan. Tren modernisasi kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik akan meningkatkan ketegangan dan kompetisi kekuatan militer. Dinamika perkembangan ini membawa pengaruh terhadap strategi pertahanan Indonesia dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Dengan melihat beberapa tren yang terjadi di kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini, maka sebaiknya Amerika Serikat harus memainkan peranan mitra dan



bukan menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Karena situasi sekarang berbeda dengan situasi dalam Perang Dingin, Washington harus menghormati prinsip sentralitas ASEAN dan norma-norma penting ASEAN seperti tidak ada campur tangan urusan negara lain (non intervensi).

Kebangkitan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara terus menguat baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Setelah perang dingin berakhir, kekuatan serta pengaruh AS terus berkurang dan sebaliknya Tiongkok justru semakin memperlihatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Tiongkok memberikan tantangan yang signifikan secara ekonomi, militer dan politik tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi secara tidak langsung merupakan ancaman bagi AS Yang terdekat adalah tantangan ekonomi yang dihadapi ASEAN, dimana tingginya tingkat

The shift in world economic growth (center of gravity) to Asia resulted in political relations, diplomacy and the military in the region to be very dynamic, encouraging the US foreign policy focus to the Asia-Pacific (pivot to Asia), and will project an 60% of its military strength to Asia, so it gets a reaction from China. The emergence of the idea of the establishment of the Indo-Pacific Power initiated by the US, Japan, and Australia as well as trying to attract India, will further ignite China's reaction. The consequences of the growing US-China political tensions made the relations among states in the region polarized, and further impact on the escalation of conflict in the South China Sea, East China Sea, and the conflict on the Korean Peninsula which also increase.

to play the role of "balancer." Philippines, for example, has been active in garnering the US support in the form of joint military exercises and arms transfers.

The response from the ASEAN countries over the US re-engagement in the Asia-Pacific vary. Although rebalancing of the US is useful to influence Beijing, but ASEAN also have interest to take advantage of the development of economic relations with China which is growing rapidly. Several countries in the Asia-Pacific have efforts to modernize their military forces. As one consequence of increased national prosperity, some countries in the region have used the opportunity to increase the defense budget to increase the strength of its defense capabilities. Another reason of some countries to modernize its military strength due to a few regions in the world and in the region that still holds the potential for conflict. Modernization of military force is also influenced by defense technology advances. Trends in military modernization in the Asia Pacific region will increase tensions and military competition. The dynamics of these developments affected the Indonesian defense strategy in order to participate and maintain security and stability in the region.

By looking at some of the trends taking place in the Asia Pacific region lately, then the US should play a role as a partner but not play a leader of Southeast Asia. Since the current situation is different from the situation in the Cold War, Washington must respect the principle of ASEAN centrality and important norms of ASEAN as no interference affairs of other countries (non-intervention).

The Awakening of China's influence in Southeast Asia continues to streng then both the economic, political, and military. After the cold war ended, the power and influence of the US continue to decrease and vice versa China is increasingly showing its influence in Southeast Asia. China provide significant economic, political and military challenges, not only to Southeast Asia, but it is indirectly a threat to the US. The nearest one is the economic challenges faced by ASEAN, where high rates of economic growth in China makes China encouraged to invest in developing countries like ASEAN. This, of course becomes a competition, where the US is also an important trade and investment partner of ASEAN.

The future security of Southeast Asia will be shaped by several political and economic factors that influence each other. The main factors include: Southeast Asian economic development, China's economic and political development and its interaction with Southeast Asia, resistance and maintain the integrity of the country, the issue of regional integration and cooperation, external actors, particularly the US, Japan, and Australia also affect the region. The bigger challenge coming from China is the emergence of China as a military-political actor. China continues to modernize its military and changed his focus to the Southern region, particularly China which greatly increases the strength of its Navy, which is finally turn to focus on the South China Sea, which Tiongkok claims as its territory. For the US, Tiongkok's economic-political diplomacy has risen to highly invisible and clever. While China maintains its claim over the Paracel and Spratly islands that circle in the

the South China Sea



In general there are two interests of the United States in Southeast Asia. First: Southeast Asian open sea lines, because most of the world's trade passes through the Strait of Malacca. Second: Southeast Asia is important as a post for the movement of the US military presence in the Western Pacific and Indian Ocean.

Rebalancing the US over Asia Pacific represents a fundamental change in the US defense strategy. Along with rebalancing the US, the rise of China will be a central factor in the security landscape in Asia Pacific. Some parties in Southeast Asia are concerned that the US rebalancing can break the ASEAN countries based on their perceptions of threats to China. The dividing line may be whether a country has a territorial dispute with China or not. For the claimant states, the US is expected

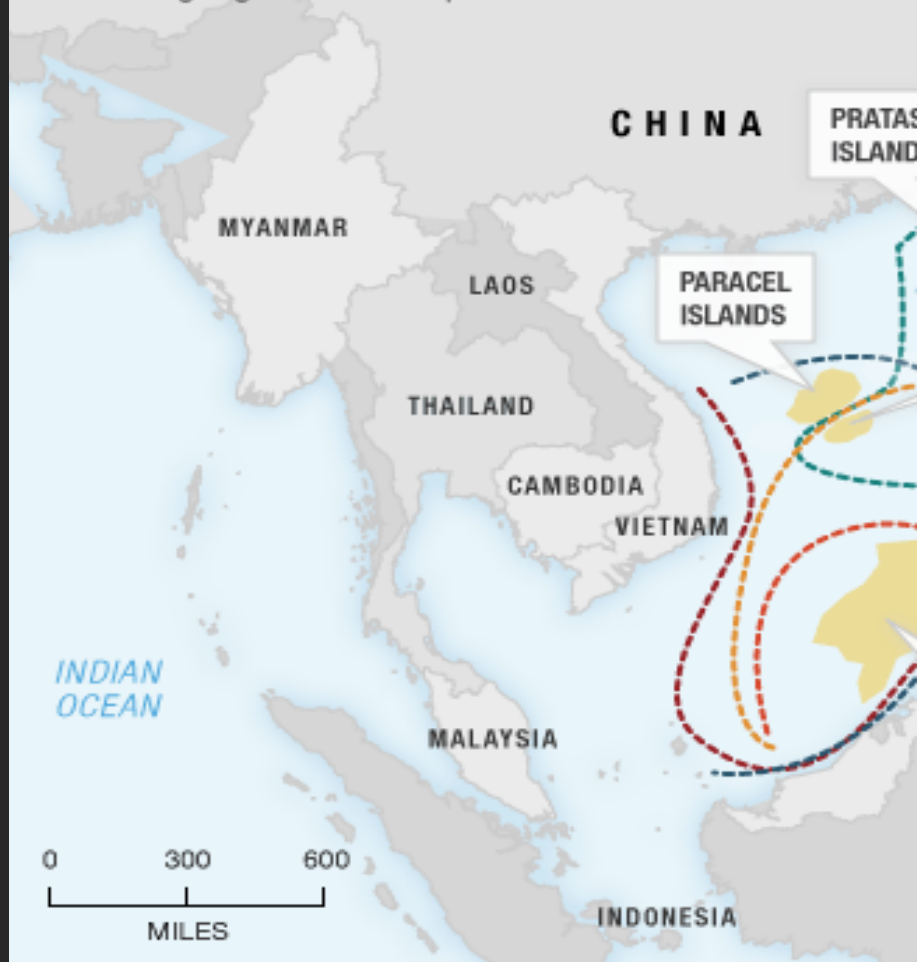
pertumbuhan ekonomi Tiongkok membuat Tiongkok terdorong untuk melakukan investasi di negara-negara berkembang seperti kawasan ASEAN. Hal ini tentu saja menjadi persaingan, dimana AS juga merupakan partner penting perdagangan dan investasi ASEAN.

Masa depan keamanan kawasan Asia Tenggara akan terbentuk oleh beberapa faktor politik dan ekonomi yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor utamanya antara lain: perkembangan ekonomi Asia Tenggara, pembangunan ekonomi dan politik Tiongkok dan interaksinya dengan Asia Tenggara, perlawanan dan mempertahankan keutuhan negara, masalah integrasi regional dan kerjasama, aktor-aktor eksternal, terutama AS, Jepang, dan Australia juga turut mempengaruhi kawasan. Tantangan lebih besar yang datang dari Tiongkok adalah munculnya Tiongkok sebagai aktor politik-militer. Tiongkok terus memodernisasi militernya dan merubah fokusnya ke kawasan Selatan, dimana secara khusus Tiongkok sangat meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya, yang pada akhirnya dalam rangka fokus di Laut Tiongkok Selatan yaitu wilayah yang di klaim Tiongkok sebagai teritorinya. Bagi AS diplomasi ekonomi-politik Tiongkok telah meningkat menjadi sangat tidak terlihat dan cerdas. Disaat Tiongkok mempertahankan klaimnya atas pulau Spratly dan Paracel yang melingkar di Laut Tiongkok Selatan, dan menolak panggilan untuk pembicaraan multilateral mengenai konflik Spratly, Tiongkok justru melakukan negosiasi satu per satu ke masing-masing negara yang terlibat konflik tersebut. Adanya persaingan eksistensi antara AS dan Tiongkok di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara kedalam politik strategi AS dalam menghadapi Tiongkok. Ada dua ancaman militer Tiongkok terhadap Asia Tenggara yang secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi AS dalam strateginya terhadap Tiongkok. Dua ancaman militer konvensional dari Tiongkok membutuhkan respon AS tersebut adalah: Pertama, hegemoni Tiongkok yang agresif di Asia Tenggara mengancam kebebasan pelayaran di Laut Tiongkok Selatan, sehingga membuat AS, Jepang, bahkan negara-negara Asia Tenggara masuk dalam politik Tiongkok tersebut. Dengan demikian AS dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari dukungan dari negara-negara ASEAN untuk menjadi keamanan jalur laut atau justru sebaliknya, ada kemungkinan negara-negara ASEAN sendiri yang akan meminta bantuan Angkatan Laut AS. Ketidakpastian di perairan Laut Tiongkok Selatan ini tentu saja menciptakan ketegangan keamanan. Dalam kondisi tertekan seperti ini akan mendorong negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan dari kekuatan yang dapat mengimbangi Tiongkok. Sehingga sangat mungkin bagi ASEAN untuk meminta kehadiran militer AS yang lebih transparan dan substansial. AS juga tidak punya pilihan lain bahwa jalur Asia Tenggara akan menjadi prioritas utama untuk kelancaran perekonomiannya dan juga merupakan kawasan kunci dalam pergerakan militer AS. Pada akhirnya ada keharusan bagi AS untuk menghadirkan militernya di kawasan ini dalam konteks pengamanan terhadap kepentingan tersebut.

Wilayah Laut Tiongkok Selatan juga menyimpan konflik yang melibatkan beberapa negara ASEAN antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Klaim kepemilikan kepulauan Spratly yang tumpang tindih dapat berpotensi menimbulkan konflik bersenjata jika tidak segera ditangani dengan serius. Hal ini dapat membahayakan keamanan kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dunia.

Besarnya potensi konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara memaksa ASEAN untuk serius menjaga segala kemungkinan gangguan keamanan yang muncul. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghindari potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melalui pendekatan negosiasi secara bilateral yang dilakukan secara formal maupun informal yang lazim digunakan dalam mengelola konflik regional dan internasional. Untuk menjaga stabilitas keamanan regional khususnya dalam mencegah sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan yang mengarah pada konflik militer terbuka, telah dilakukan usaha-usaha antara lain membangun kepercayaan bersama (confidence and trust building) dengan meningkatkan saling keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, meningkatkan program joint development

sumber : bigdogdotcom.wordpress.com



South China Sea, and rejected calls for multilateral talks on the Spratly conflict, China actually negotiated one by one to each of the countries involved in the conflict. The competition of the existence between the US and China in the region, indirectly bringing Southeast Asia into the US political strategy in facing China. There are two China's military threatTiongkok against Southeast Asia that indirectly benefit the US in its strategy against China. Two conventional military threats from Tiongkok requiring the US's response is: First, the aggressive Chinese hegemony in Southeast Asia threatens freedom of shipping in the South China Sea, thus making the US, Japan, and even Southeast Asian countries enter into China's politics. Thus the US can take advantage of these conditions by seeking ASEAN countries supports to guard the security of sea lanes or on the contrary, there is the possibility of ASEAN countries themselves that will ask for the help of the US Navy. The uncertainty in the South China Sea waters is of course creating security tensions. In this depressed condition will encourage ASEAN countries to seek the support of the forces that can counterbalance China. So it is very possible for ASEAN to ask the US military presence more transparent and substantial. The US also has no other choice that the path of Southeast Asia will be a major priority for the smooth running of its economy and is also a key area in the movement of the US military. In the end there is necessity for the US to bring its military in the region in the context of security against these interests.

South China Sea region also has potential conflicts involving some ASEAN countries include Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei Darussalam. Claim ownership of the Spratly islands which overlaps can potentially lead to armed conflict if not handled seriously. This can harm security of Southeast Asia, which is one of the center of world economic growth areas.

The magnitude of the potential conflicts in the South China Sea and its effect on the stability of Southeast Asia forced ASEAN to seriously keep any possible security problems that may appears. All efforts have been made to avoid potential conflicts in the South China Sea through peaceful conflict resolutions by all disputed parties involved. One of such effort is through peaceful negotiation approaches either bilaterally or through multilateral and bilateral negotiations approach which is done formally or informally commonly used in managing regional and international conflicts. To maintain regional security and stability, especially in preventing the South China Sea territorial dispute that led to open military conflict, have been made efforts include developing mutual trust (confidence and trust building) by increasing mutual openness/ transparency, accountability, improve joint development programs and implement demilitarization. Besides, it also encourages countries claim ownership of each region in the South China Sea (claimant states) to conduct dialogue and agree on a Code of Conduct (COC) in accordance with the Declaration of Conduct (DOC) and the 1982 UNCLOS accompanied by communicating bilateral agreements of the whole claimant states in multilateral forums in order to achieve harmony in dispute resolution.



Managing Water Problems

Disputes among countries in the region of the East China Sea and South China Sea into serious problems and challenges for countries in Asia-Pacific region. Diplomatic tension between China and Japan in the East China Sea over the Senkaku island (Japan) or Diaoyu island (Tiongkok) can be a source of disturbance of stability in the region. The US "Rebalancing" policy in Asia-Pacific region is the US's strategy to offset the effect of an increase in military power, politics and economics of China in Asia Pacific region. The claim of Tiongkok's maritime territorial (Nine Dotted Lines) in the South China Sea is a separate issue with ASEAN countries (Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei) that also have claims in the South China Sea region.

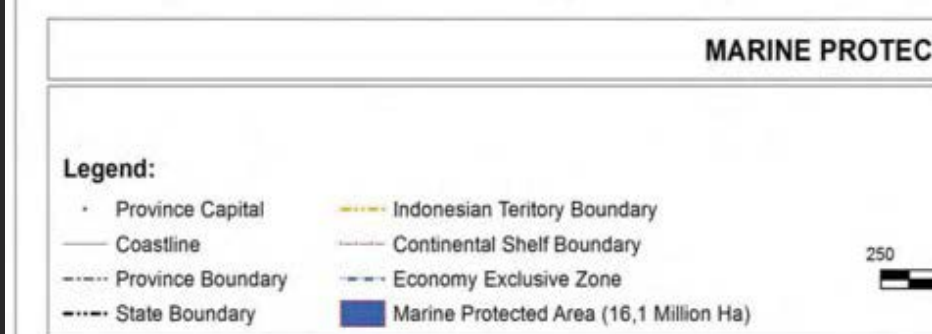
The role of political and defense diplomacy among countries have overlapping claims in the same area becomes the only method in an effort to prevent armed conflict in the region. The role of ASEAN as a regional organization in managing issues in the South China Sea waters is very important. The agreement "Declaration of Conduct (DoC)" in the South China Sea region becomes the primary mean to mediate disputes among ASEAN countries and China which have claims on maritime territorial in the region. However, the formulation of the "Code of Conduct (CoC)" is an international legal mechanism which can bind the signatory countries in the disputed waters. South China Sea is an area of very important sea trade traffic and traveled by international

serta melaksanakan demiliterisasi. Disamping itu juga mendorong negara-negara yang saling mengklaim kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan (claimant states) untuk melakukan dialog dan menyepakati Code of Conduct (COC) sesuai Declaration of Conduct (DOC) dan UNCLOS 1982 disertai dengan mengkomunikasikan bersama kesepakatan bilateral seluruh claimant states dalam forum multilateral agar tercapai keselarasan dalam penyelesaian sengketa.

Mengelola Permasalahan Perairan

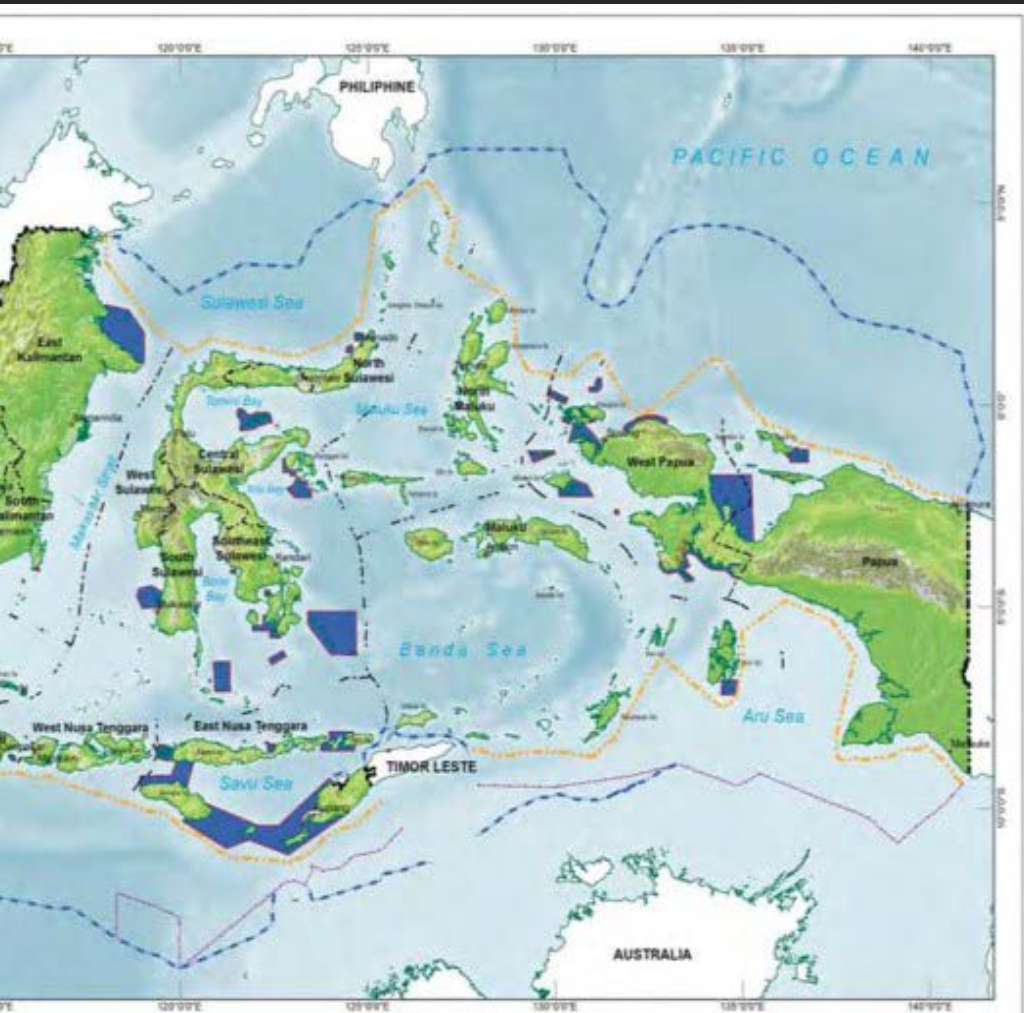
Perselisihan antara negara-negara di wilayah Laut Tiongkok Timur dan Laut Cina Selatan menjadi permasalahan dan tantangan serius bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang di Laut Tiongkok Timur atas P. Senkaku (Jepang) atau P. Diayou (Tiongkok) dapat menjadi sumber gangguan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Kebijakan "Rebalancing" Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik merupakan strategi negara itu untuk mengimbangi peningkatan pengaruh kekuatan militer, politik dan ekonomi Tiongkok di wilayah Asia Pasifik. Klaim laut teritorial Tiongkok (Nine Dotted Lines) di Laut Tiongkok Selatan merupakan permasalahan tersendiri dengan negara-negara anggota ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) yang juga memiliki klaim di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Peranan diplomasi politik dan pertahanan antara negara-negara yang memiliki klaim yang tumpang tindih di wilayah yang sama menjadi metode satu-satunya dalam upaya mencegah terjadinya konflik bersenjata di kawasan tersebut. Peranan ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengelola permasalahan perairan di Laut Tiongkok Selatan sangat penting. Dengan telah disepakatinya "DoC" di wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi sarana utama dalam memediasi perselisihan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok yang memiliki klaim laut teritorial di wilayah tersebut. Namun perumusan "CoC" merupakan mekanisme hukum internasional yang dapat lebih mengikat negara-negara penadatangannya di wilayah perairan yang disangkutkan. Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan lalu lintas perdagangan laut yang sangat penting dan ramai dilalui oleh kapal-kapal niaga pelayaran internasional. Selain Tiongkok, Jepang, Korea, India dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta Amerika Serikat dan Australia menganggap jalur rute perdagangan laut (seaborne merchant route) di Laut Tiongkok Selatan sangat menentukan kelangsungan kehidupan ekonomi negara-negara tersebut. Rute laut ini menghubungkan rute perdagangan energi khususnya bagi negara-negara Asia Timur dari Timur Tengah dan Afrika yang melalui Selat Malaka.

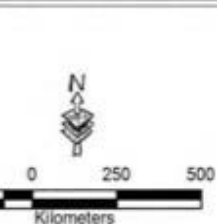


Sumber : www.mongabay.co.id

Dengan demikian kepentingan negara-negara yang memiliki perselisihan laut teritorial di wilayah Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan membutuhkan forum dialog komunikasi seperti JIDD. Hal ini bertujuan untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan perairan dan perdamaian di kawasan tersebut. Peningkatan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik Barat khususnya dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di kawasan ini adalah bagian dari strategi akan meningkatnya kekuatan militer Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan kekuatan militer Angkatan Laut Tiongkok yang ditujukan untuk mengontrol wilayah laut teritorial yang diklaimnya dapat diseimbangi dengan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik Barat.



CONTENDED AREA DISTRIBUTION



Information Sources:
 - Topography Map. Scale1: 1.000.000 BAKOSURTANAL
 - Administration Map. DEPDAGRI. 2007
 - Nasional Spatial Plan Map. PP. 26 Tahun 2008
 - Ministry Decree of Marine and Fisheries Affairs No PER.01/MEN/2009
 - Ministry of Marine and Fisheries Affairs. 2010.

commercial ships. Besides China, Japan, Korea, India and countries in Southeast Asia, and the United States and Australia consider seaborne merchant route in the South China Sea will determine the sustainability of the economic life of these countries. This sea route connecting the trade route for energy, particularly East Asian countries from the Middle East and Africa through the Straits of Malacca.

Thus the interests of countries that have maritime territorial disputes in the region of the East China Sea and South China Sea requires a forum for communication dialogue such as JIDD. It aims to avoid an escalation of the conflict that can threaten the stability of maritime security and peace in the region. The escalation of the US military presence in the Western Pacific region, especially to maintain security and stability in the region is part of

its strategies against the increase of Tiongkok's military power in recent years. The increase of military power of China's PLAN (People Liberation Army Navy) aimed to control waters territorial which claimed can be balanced by increasing the US Navy force in the Western Pacific. The presence of the US Navy force, the Pacific Fleet maintain the balance of military power in East Asia. It is associated with the strategic defense agreement owned by the US with the three countries in Asia Pacific (Japan, Taiwan and the Philippines) that have maritime disputes with China.

On the remarks in a panel discussion (Managing Contested Waters) the US Navy Pacific Fleet Commander, Admiral Harry B. Harris Jr, conveyed the role of the US Pacific Fleet in the policy of the US "Rebalancing", especially in the Western Pacific region.

But our strong position on contested claims alone does not head off possible conflict over these issues - and we know that. It takes all of us in this region, working together, to find acceptable solutions."

Despite the diplomatic political settlement on the East China Sea and South China Sea still takes quite a long time, but with the defense dialogue forum such as JIDD can promote peace and solve problem on the Asia-Pacific waters through diplomacy, defense cooperation (joint border patrol / surveillance) and economic (exploration and exploitation of oil and gas) and fisheries in the waters around the area.

Part II

Addressing Problems of Non-Traditional Threats

A threat is any effort and activity, both domestic and abroad which is considered dangerous to national sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation. While the threat that could disrupt the security can be political and military nature. In the sense that the main security threat to the country is a threat to the sovereignty and territorial integrity. Since the emergence of the concept of the nation until the Cold War era, a threat to the sovereignty and territorial integrity always threaten the survival of the nation and state, this is caused by the presence of traditional threats such as territorial aggression from other countries which use organized military forces. Based on the character of the threat, then the only instrument that is the most effective way to deal with is an organized military force. However, in

Kehadiran kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat, Armada Pasifik selama ini menjaga keseimbangan kekuatan militer di kawasan Asia Timur. Hal ini terkait dengan perjanjian pertahanan strategis yang dimiliki Amerika Serikat dengan tiga negara di kawasan Asia Pasifik (Jepang, Taiwan dan Filipina) yang memiliki sangketa wilayah perairan laut dengan Tiongkok.

Dalam sambutan panel (Managing Contested Waters) Komandan Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral Harry B. Harris Jr., menyampaikan peranan Armada Pasifik Amerika Serikat dalam kebijakan "Rebalancing" Amerika Serikat khususnya di kawasan Pasifik Barat.

Meskipun penyelesaian politik masalah perairan di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan adanya forum dialog pertahanan seperti JIDD dapat mempromosikan perdamaian dan penyelesaian masalah perairan di kawasan Asia Pasifik melalui diplomasi kerjasama pertahanan maupun ekonomi dan perikanan di sekitar wilayah perairan tersebut.



Bagian II

Mengatasi Permasalahan Ancaman Non Tradisional

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sementara itu ancaman yang mengganggu keamanan bisa bersifat politik dan militer. Dalam arti ancaman keamanan yang utama terhadap negara adalah ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial. Sejak munculnya konsep bangsa dan negara hingga masa Perang Dingin bangsa-bangsa di dunia, ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial selalu mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini disebabkan oleh adanya ancaman tradisional berupa agresi teritorial dari negara lain dengan menggunakan kekuatan militer yang terorganisasi (angkatan bersenjata). Berdasarkan karakter ancaman tersebut, maka satu-satunya instrumen yang paling efektif untuk menghadapinya adalah penggunaan kekuatan militer yang terorganisir. Namun, dalam masa pasca-Perang Dingin seperti saat ini, dominasi karakter ancaman terhadap negara yang selama ini bersifat tradisional secara berangsur-angsur mulai menurun. Ancaman terhadap unit negara juga mulai kabur dalam artian hampir tidak lagi ada ancaman nyata berupa agresi militer untuk merebut wilayah negara lainnya. Secara signifikan ancaman terhadap negara mulai mengarah secara langsung terhadap individu-individu yang di dalamnya yang merupakan salah satu elemen pembentuk negara. Perubahan politik dunia yang terjadi



Sumber : fajar-aryanto.lblogspot.com

this post-Cold War era, the dominance of threat character against the state which has traditional character gradually began to decline. The threat to the state units also began to blur in the sense that there is almost no longer real threat of military aggression to seize other state territory. Significantly, threat against the country began to lead directly to individuals in it which is one of the elements forming the country. The changing of world politic in the era of globalization, has presented a competition among nations which gradually become a threat. This conditions tend to lead to quite hard struggle for influence, either globally, regionally and nationally. This development causes a change in the security situation of the world with the advent of the new security issues such as non-traditional threats. Non-traditional threats can be an act of terrorism, piracy, hijacking, smuggling, drug trafficking, illegal logging and illegal fishing.

In the past, traditional security issues are quite prominent, which is related to the geopolitical and geostrategic, in particular the influence of the western block power and the eastern block. The world concerns especially on the issue of the development of military power and strategic weapons along with hegemony. However, security issues of the last decade become more and more complex with the increase of terrorist activities, robbery and piracy, smuggling, illegal immigration, illegal fishing, and other transnational crimes. The forms of crime such as non-traditional threat is getting more complex because it is controlled by transnational actors, and have technical ability and financial support.

Observing the dynamics of the strategic context, either

global, regional or domestic, the most likely threat faced by Indonesia and the nations of the world are non-traditional security threat. Non-Traditional threats are more likely to come from organized transnational crimes committed by non-state actors, by utilizing domestic conditions which are not conducive. It could threaten all individuals from any country who become target of terrorism. The actors also can not be determined exactly in a certain country, but terrorism is more likely a very large network. That is why the threat of terrorism is also often categorized as transnational security threat. Terrorism spawned 'new war' type which threatens the survival of individuals by conducting large-scale terror regardless of national borders.

In addressing the domestic security issues, especially non-traditional threats, defense cooperation with foreign countries is one of the important strategic defense policies. The International cooperation will contribute to the success of the development of the defense force. International defense cooperation implemented as an integral part of Indonesia's policy to address non-traditional threats. Apart from that international cooperation, it is also needed to build mutual trust with other nations for the establishment of security and stability of the region. Regional issues will be resolved by promoting the spirit of togetherness and balance of interests, which are built on the principle of equality, mutual respect, and non-interference.

To cope with non-traditional threats, the Indonesian Defense University which is fully supported by the Indonesian Ministry of Defense and Ministry of Foreign Affairs organized the Jakarta International Defense Dialogue (JIDD). Maritime security and complexity issues require cooperation among countries along with regional and international bodies, trade legislation, the appropriate migration, and deployment of military forces in the maritime region. Cooperation in addressing maritime issues such as non-traditional threats is not only become national interest of each country, but also in an effort to create safer and protected world from threats arising from marine transboundary issues.

Modernization and Stability of Military Force

Indonesia is one country in the world with a very large area. Based on the data, Indonesian has an area of 1,919,440 km² or number 15 of the world. As a sovereign state, Indonesia is obliged to maintain the integrity of its territory. In Act No. 3 of 2002 on National Defense stated that the defense of the country is also called the national defense is any effort to defend the country's sovereignty, territorial integrity of a country and the safety of the entire nation from threats and disruption to the state integrity.

di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa sebetulnya lambat laun menjadi suatu ancaman. Dimana kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup kuat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru berupa ancaman non tradisional. Ancaman non tradisional dapat berupa aksi terorisme, perompakan, pembajakan, penyelundupan, perdagangan narkoba, illegal logging maupun illegal fishing.

Pada masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat dan blok timur. Kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Namun demikian, isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan berupa ancaman non tradisional ini makin kompleks hal ini karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini adalah ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman Non Tradisional lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisasi lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Seperti halnya yang bisa mengancam semua individu dari negara mana pun dan di negara mana pun yang menjadi tempat sasaran aksi terorisme tersebut. Para aktornya pun tidak dapat ditentukan secara pasti berada di suatu negara tertentu, tetapi terorisme lebih merupakan suatu jaringan yang sangat luas. Karena itu ancaman terorisme juga seringkali dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang bersifat transnasional. Terorisme melahirkan jenis 'perang baru' yang mengancam keberlangsungan hidup individu-individu dengan melakukan teror secara besar-besaran tanpa mempedulikan batas-batas negara.

Dalam mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri khususnya ancaman non tradisional, kerja sama pertahanan dengan negara luar merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sangat penting. Kerja sama internasional ini akan memberi kontribusi yang tidak kecil bagi keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan. Kerja sama pertahanan internasional dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan Indonesia untuk mengatasi ancaman non tradisional. Selain dari pada itu kerja sama internasional

perlu digalang sebagai salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat



Sumber: antaratoto.com

kebersamaan dan perimbangan kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan tidak saling intervensi.

Dalam rangka mengatasi ancaman non tradisional itulah Universitas Pertahanan Indonesia dengan didukung penuh oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD). Keamanan maritim dan kerumitan permasalahan yang meliputinya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar negara dan badan-badan regional serta internasional, aturan perundang-undangan perdagangan, migrasi yang sesuai, dan pengerahan kekuatan militer di wilayah maritim. Kerjasama dalam mengatasi permasalahan maritim seperti ancaman non tradisional bukan hanya menjadi kepentingan nasional masing-masing negara saja, tetapi juga dalam upaya menciptakan dunia yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang timbul atau yang berasal dari permasalahan lintas batas laut.

Modernisasi dan Stabilitas Kekuatan Militer

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan wilayah yang sangat luas. Berdasarkan data maka luas wilayah Indonesia adalah 1.919.440 km² atau urutan ke 15 di dunia. Sebagai negara yang berdaulat maka Indonesia wajib mempertahankan keutuhan wilayah teritorialnya. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

In the Act also stated that the system of national defense in facing military threat placed the Indonesian Armed Forces as the main component, supported by reserve component and support component. Defense condition of a country can be seen from the condition of the main weapon system of armed forces. The more modern and complete of the main weapon system can be an indicator of an increasingly robust defense of the country.

The development of current Geo-political situation, especially in Asia demanded Indonesia to improve both the quality and quantity of defense equipment to be respected by neighboring states. With the increasing the ability of military armaments, it is hoped that Indonesia not be underestimated in facing of the possibility of a potential conflict in the region.

Talking about quality then one of the ways is to modernize the military main weapon system. With the capabilities of modern main weapon system, then it is expected that Indonesia can make a balance against advanced military power of neighboring countries. The fulfillment of the main weapon system basically depend upon the government budget. To resolve the matter, the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces stick to the fulfillment of the Minimum Essential Force (MEF). By the year 2013, has been conducted the modernization program of the main weapon system in accordance with the Minimum Essential Forces (MEF) for a period of 15 years. Among the purchases of the main weapon system are procurements for the Air Force Sukhoi Jets, Leopard tanks and attack helicopters for the Indonesian Army and Guard Missile Destroyer ships (PKR) and submarines for the Indonesian Navy.

With the procurement of some military armaments the map of military power in Asia, particularly Southeast

Asia can be said to be balanced, even based on Military Analysis Institute Global Firepower released the power of Indonesia now ranks 15th world since June 2013 and for the Asia-Pacific region, Indonesia is the 7th strongest country, far more above Malaysia which rank of 33 and Singapore of 47.

Strategic balance from the modernization of main defense system is to materialize the power and the country's defense capability which has good strategic combat power ratio either in military technology scale and deterrent scale. Besides, it is also a strategic balance of power of a country that has a prerequisite of political-economic strength and military defense. The increase of the defense strength is also expected to return Indonesia as one of the respected forces in the military.

Strengthening Legal Cooperation and Diplomacy in Regional Water

Under UNCLOS in 1982 Indonesia is an archipelagic nation. Indonesia has a vast sea that is approximately 5.6 million km² with a coastline of 81,000 km, with a range of potential resources, especially marine fisheries which are quite large. Indonesia has a very extensive marine area, but it is less secure and potentially because border disputes with neighboring states. For continental shelf, Indonesia is entitled to all natural resources found in the sea up to a depth of 200 m. Territorial sea border as far as 12 miles of straight-line basis and exclusive economic zone boundaries (EEZ) as far as 200 miles from the base line of the sea. This is inseparable from the increasing shipping activities in Indonesia waters, especially in territorial sea. The intensity of shipping, some of which cargo ships and fishermen ships, this is not rule out the



Dalam UU juga disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Kondisi pertahanan suatu negara bisa dilihat dari kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) angkatan bersenjata. Semakin modern dan lengkap alutsista suatu negara dapat dijadikan indikator semakin kuatnya pertahanan negara tersebut.

Situasi geo politik yang berkembang saat ini terutama di kawasan Asia menuntut Indonesia untuk meningkatkan kemampuan alutsista baik kualitas dan kuantitas agar dapat disegani oleh negara-negara tetangga. Dengan meningkatnya kemampuan alutsista TNI maka diharapkan Indonesia tidak dianggap remeh dalam menghadapi kemungkinan potensi konflik di wilayah Asia.

Bila berbicara kualitas maka salah satu cara adalah dengan modernisasi alutsista TNI. Dengan kemampuan alutsista yang modern maka Indonesia diharapkan dapat menandingi kekuatan militer negara tetangga yang sudah lebih maju. Pemenuhan ideal kebutuhan alutsista TNI pada dasarnya sangat tergantung kepada anggaran dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut maka Kemhan dan TNI berpatokan kepada pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force- MEF). Sampai dengan tahun 2013, telah dilakukan program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Diantara pembelian alutsista tersebut adalah pengadaan pesawat Sukhoi untuk TNI AU, Tank Leopard dan helikopter serang untuk TNI AD serta Perusak Kawal Rudal (PKR) dan kapal selam untuk TNI AL.

Dengan pengadaan beberapa alutsista TNI maka peta kekuatan militer di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dapat dikatakan seimbang, bahkan berdasarkan Lembaga Analisa Militer Global Firepower merilis kekuatan Indonesia kini berada di urutan ke-15 dunia sejak Juni 2013 dan untuk kawasan Asia Pasifik, Indonesia tercatat sebagai negara terkuat Nomor 7, jauh di atas Malaysia urutan ke 33 dan Singapura urutan ke 47.

Pertimbangan strategis dari modernisasi alutsista TNI antara lain untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki perbandingan daya tempur strategis baik skala teknologi militer maupun skala penangkalan. Selain itu merupakan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang memiliki prasyarat kekuatan politik-ekonomi dan pertahanan militer. Peningkatan kekuatan pertahanan ini juga diharapkan akan mengembalikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang disegani dalam bidang militer.



Memperkuat Kerjasama Hukum dan Diplomasi di Wilayah Perairan

Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara kepulauan. Indonesia memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas, namun kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan Negara tetangga. Untuk landas kontinen, Negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di laut teritorial. Peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut.

Selain itu, Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan Negara tetangga. Untuk itu diperlukan peraturan yang baku mengenai hukum laut Indonesia khususnya dilaut teritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Negara tetangga. Kurang seriusnya pemerintah dalam menangani wilayah perbatasan, mengakibatkan penyelesaian sengketa perbatasan mengenai laut teritorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut teritorial dari pangkuan Negara Indonesia. Kurangnya pengawasan terhadap laut teritorial di wilayah Indonesia juga telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan

marine accidents.

In addition, Indonesia has undergone many border disputes with neighboring countries. It required standard rules concerning Indonesian maritime law, especially the territorial sea which is often traversed by foreign vessels and cause a lot of the ongoing conflict with neighboring countries. Less serious of the government in dealing with the border region, cause the settlement of disputes concerning the territorial sea boundary resulting the loss of the territorial waters of Indonesia. Lack of supervision to the territorial sea in many parts of Indonesia also have led to the loss of natural resources especially fisheries potency stolen many foreign fishermen.

UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) acknowledges the desire to establish law and order the seas and oceans which will facilitate international communication and promote the use of the seas and oceans peacefully. In addition there is also a desire to utilize the natural resources fair and efficiently, conservation and biological assessment , as well as

stage, Indonesia also has abundant of diverse natural resources. However, it seems this country is not able to "manage" appropriately the strategic position and its natural resources.

On the other hand, if we look at the actual development of current international politics that suggest the changing of geopolitical shift from the Middle East heading to Southeast Asia, in particular the South China Sea. The transition cues visible from several indications, such as the United States to rapidly build a missile defense system in Asia to counter North Korea maneuver . The US also said it would expand its military arrangements in Southeast Asia and the Indian Ocean, including to increase cooperation with Australia and deployment of warships in Singapore. Tensions between the States in the region are likely to increase because of poor political win-win solution. The urgency of South China Sea position is vital in the global geopolitical shift, allowing the obstacles toward the dispute resolution efforts, even alleged that the issue of territorial conflict that could be the trigger to open military conflict. This situation will certainly affect countries around the



Sumber : milliter-review.blogspot.com

protection of the marine environment. According to the International maritime law , in outline Indonesia as an archipelagic nation has Territorial , Inland Waters , Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. In Indonesian geopolitics, Indonesia has strategic geopolitical in global interaction , and its position between two oceans and two continents, this is great opportunity that could be played on the international

disputed area, which is geographically, the position of Indonesia is quite close to the South China Sea, both in the context of Southeast Asia, ASEAN and Asia Pacific. This situation is predicted will last long, despite waiting for 'momentum' , the States involved in the conflict are also making anticipative efforts intensively and openly, especially the US and its allies versus Tiongkok with its supporters.

samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut. Dan sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental. Dalam Geopolitik Indonesia, Negara Indonesia memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global, selain posisinya di antara dua samudera dan dua benua, merupakan peluang betapa besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional, juga memiliki kekayaan alam (SDA) beraneka ragam dan melimpah ruah. Namun, sepertinya bangsa ini tidak mampu "mengelola" secara tepat dan baik letak ke-"strategis"-an posisi dan kekayaan SDA yang dimiliki.

Di sisi lain, apabila kita melihat perkembangan aktual geopolitik internasional saat ini mengisyaratkan terjadinya pergeseran sentral geopolitik dari Kawasan Timur Tengah menuju ke Asia Tenggara, khususnya Laut Tiongkok Selatan. Isyarat peralihan tersebut terlihat dari beberapa indikasi, diantaranya Amerika Serikat (AS) ingin secepatnya membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan manuver Korea Utara. AS juga menyatakan akan memperluas pengaturan militernya di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan penempatan kapal-kapal perang di Singapura. Ketegangan antara Negara-negara di kawasan tersebut secara politis cenderung meningkat karena miskinnya win-win solution. Urgensi geografis Laut Tiongkok Selatan yang cukup vital dalam pergeseran geopolitik global, memungkinkan terus terkendalanya upaya penyelesaian sengketa, bahkan diduga keras bahwa isu konflik teritorial itu akan menjadi trigger dalam benturan militer secara terbuka. Situasi ini tentunya akan mempengaruhi Negara-negara di sekitar wilayah sengketa, dimana secara geografis, posisi Indonesia berada cukup dekat dengan Laut Tiongkok Selatan, baik dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN maupun Asia Pasifik. Situasi ini diperkirakan akan berlangsung lama, karena selain menunggu 'momentum', Negara-negara yang terlibat konflik juga melakukan upaya antisipasif secara intensif dan terbuka, terutama AS dan sekutunya versus Tiongkok dan pendukungnya.

Saat ini, Amerika dan Tiongkok sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia. Inilah yang diprediksikan akan semakin menjajarnya konflik terbuka AS versus Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Apabila dilemma Malaka mencapai titik kulminasi akibat perang terbuka, maka besar kemungkinan jalur Selat Malaka akan "tersumbat". Sudah barang tentu jalur pelayaran akan beralih ke Selat Sunda karena dianggap rute alternatif tersingkat dari jalur-jalur lazimnya. Inilah keunggulan Indonesia secara geopolitik, terutama bagi Negara-negara yang terlibat konflik. Betapa urgensinya Selat Sunda dan alur-alur laut lain di mata dunia, karena banyak Negara tergantung pada wilayah perairannya.



Sejatinya tinggal bagaimana faktor geografis dijadikan geopolitical leverage (daya ungkit) melalui pemberdayaan secara benar dan optimal berkenaan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera. Menurut Dirgo D. Purbo (2012), geopolitik dalam wawasan nusantara merupakan jawaban untuk Kepentingan Nasional RI di abad XXI. Namun, kepentingan Nasional RI harus menjadi rujukan utama dalam memberdayakan daya ungkit (geopolitical leverage) yang melekat sebagai keunggulan geografis Indonesia. Selain itu, salah satu prioritas pembangunan RI ke depan mutlak harus menguatkan sistem pengawasan dan pengamanan selat-selat Indonesia (ALKI) yang ditopang oleh lembaga dan kementerian terkait dengan TNI-Polri sebagai ujung tombak. Diharapkan dengan sistem pengamanan dan pengawasan perairan yang terkoordinasi dengan baik lagi handal, akan meningkatkan "daya tawar" Pemerintah Indonesia di forum global manapun, dan lebih jauh lagi adalah mengubah skema geopolitical leverage menjadi geopolitical weapon, atau senjata geopolitik bagi Negara Indonesia.

LAYAH N.K.R.I
RUARI 1969 - SEKARANG
NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999



Indonesia must strengthen the supervision and security systems of Indonesia's straits supported by institutions and ministries associated with the military and police as the spearhead. It is expected that the security and surveillance systems of the waters which are well coordinated will increase the "bargaining power" of Indonesian Government in any global forum, and will further change leverage geopolitical scheme into geopolitical weapon, or geopolitical weapon for Indonesia.

Currently, the United States and China are both eyeing China Sea and the Malacca Strait. The Malacca strait is the busiest strait after Hormuz. The increase of shipping is surely happen as the dynamics of both the needs and interests of individuals, groups and nations of the world. Thi condition is predicted will enable to become an open conflict of the US versus China in the Asia-Pacific region, especially Southeast Asia. If the dilemma of Malacca lead to culminate caused by open war, then the Malacca Strait would be " clogged ". Of course, the cruise line will switch to the Sunda Strait because it is the shortest of these alternative pathways. This is the Indonesia's geopolitical advantages, especially for states involved in the conflict. This is the urgency Sunda Strait and other sea lanes in the world, because many countries depend on this water area.

Indeed the geographical factors made geopolitical leverage through empowerment correctly and optimally regarding strategic position between two continents and two oceans. According to Dirgo Purbo D. (2012), geopolitic in archipelago insight is the answer for the National Interest in the 21st century. However, the National interest should be the main reference in empowering leverage which attached as Indonesia's geographical advantage. In addition, one of the future future development of



Peran Kebudayaan Dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Oleh: Dra. Ernalem Bangun, M.A.

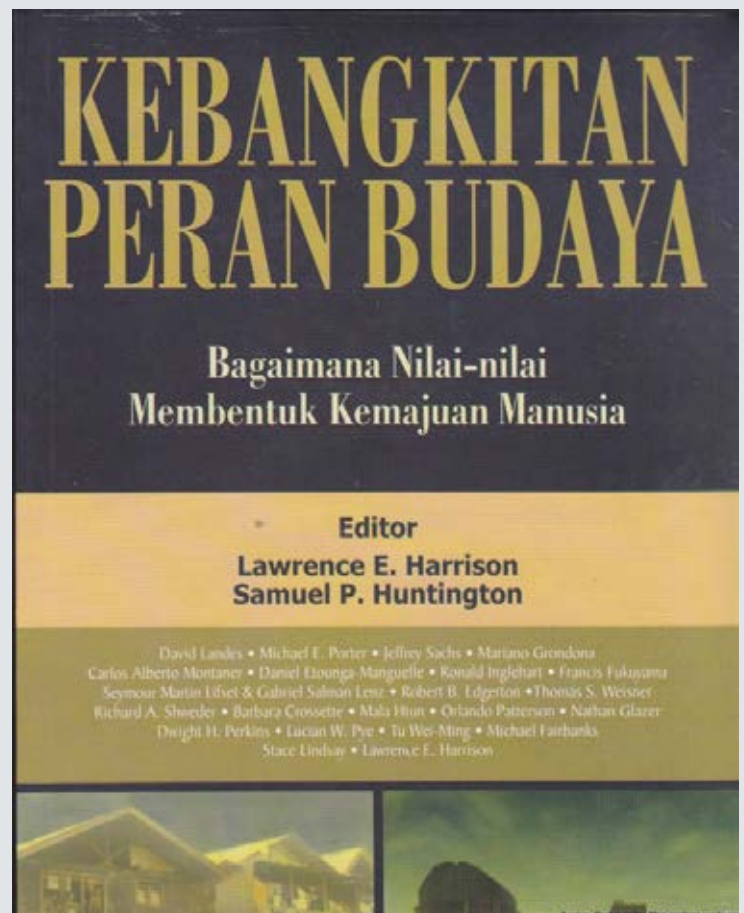
Berbicara tentang industri pertahanan layakkah kita melihat sejenak Negara Korea Selatan dalam membangun industri pertahanan mereka. Seperti diketahui, industri pertahanan Seoul kini telah menjadi kompetitor industri serupa dari Eropa yang telah lebih dahulu mapan. Bahkan tak jarang industri pertahanan asal Eropa tersungkur dalam tender internasional karena kalah bersaing dengan pesaingnya dari Negeri Ginseng. Pertanyaannya, mengapa industri pertahanan Korea Selatan mampu bersaing di dunia internasional?

Samuel P. Huntington dalam bukunya "Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia" menempatkan budaya sebagai peran utama yang membentuk kemajuan suatu masyarakat yang disebut sebagai kebangkitan peran budaya. Samuel P. Huntington, salah seorang ilmuwan terkemuka dunia, memberikan penghormatan yang tinggi terhadap peran budaya, ketika membandingkan Ghana dan Korea Selatan, yang dilanjutkan dengan pertanyaan, "Bagaimana menjelaskan perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan ini?". Lalu dijawabnya sendiri, "Tidak diragukan lagi banyak faktor yang berperan, tetapi menurut hemat saya, budaya memainkan peran besar. Penduduk Korea Selatan menghargai hidup hemat, investasi, kerja keras, pendidikan, organisasi, dan disiplin. Penduduk Ghana mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Pendeknya, budaya mempunyai andil".

Huntington mengkisahkan betapa miripnya data ekonomi Ghana dan Korea Selatan pada tahun 1960-an awal. Dua negara ini memiliki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang setara; porsi ekonomi mereka yang serupa antara produk, manufaktur, dan jasa primer; serta berlimpahnya ekspor produk primer, dengan Korea Selatan memproduksi sejumlah kecil barang manufaktur. Mereka juga menerima bantuan ekonomi dalam jumlah yang seimbang. Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa industri ekonomi terbesar nomor ke-14 dunia, perusahaan-perusahaan multinasional, ekspor mobil, alat elektronik, dan barang canggih hasil pabrik lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan perkapita yang mendekati Yunani (saat ini sudah jauh melampaui Yunani, red.). Tidak ada perubahan seperti ini di Ghana, yang PDB per kapitanya sekarang sekitar seperlimabelas dari Korea Selatan".

Korea Selatan (Korsel) saat ini tumbuh sebagai negara

dengan ekonomi maju, khususnya di sektor industri. Inovasi di sektor teknologi jadi kunci Korsel menjadi negara maju. Walaupun Korsel bukan negara besar, namun bisa jadi eksportir terbesar nomor 6 di dunia. Transformasi pembangunan ekonomi telah mengubah Korea Selatan menjadi negara dengan inovasi teknologi. Korea Selatan memiliki budaya yang menunjang inovasi untuk kemajuan negaranya dimana elemen utamanya adalah fondasi pendidikan. Menurut Economist Intelligence Unit, Korea Selatan berada di peringkat kedua sebagai negara terbaik dalam sistem pendidikan di dunia, sesudah Finlandia. Pada tahun 2009, Korea Selatan memiliki 323 ribu peneliti, meningkat 2,5 kali lipat jumlahnya dibandingkan pada tahun 1997. Di samping itu, masyarakat Korea Selatan dikenal memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Di tahun 2012, negara ini dikenal



Talking about defense industry, it is worth if we look at South Korea in building their defense industries. As is known, Seoul's defense industry has now become competitor for a similar industry from Europe which had already been established. In fact, not infrequently European defense industry lost in the international tender because of competition from South Korea. The question is, why the South Korean defense industry is able to compete internationally?

Samuel P. Huntington in his book "The Rise of Cultural Roles, How Values Shaping Human Progress" put culture as a major role in shaping the progress of a society, which is referred to as the rise of the role of culture. Samuel P. Huntington, one of the world's leading scientists, gives a high tribute to the role of culture, when comparing Ghana and South Korea, which is followed by the question, "How to explain the remarkable difference in these developments?". Then he answered himself, "No doubt many factors at play, but in my opinion, culture plays a big role. South Korean people appreciate the life-saving, investment, hard work, education, organization, and discipline. People of Ghana have different values. In short, cultures have contributed".

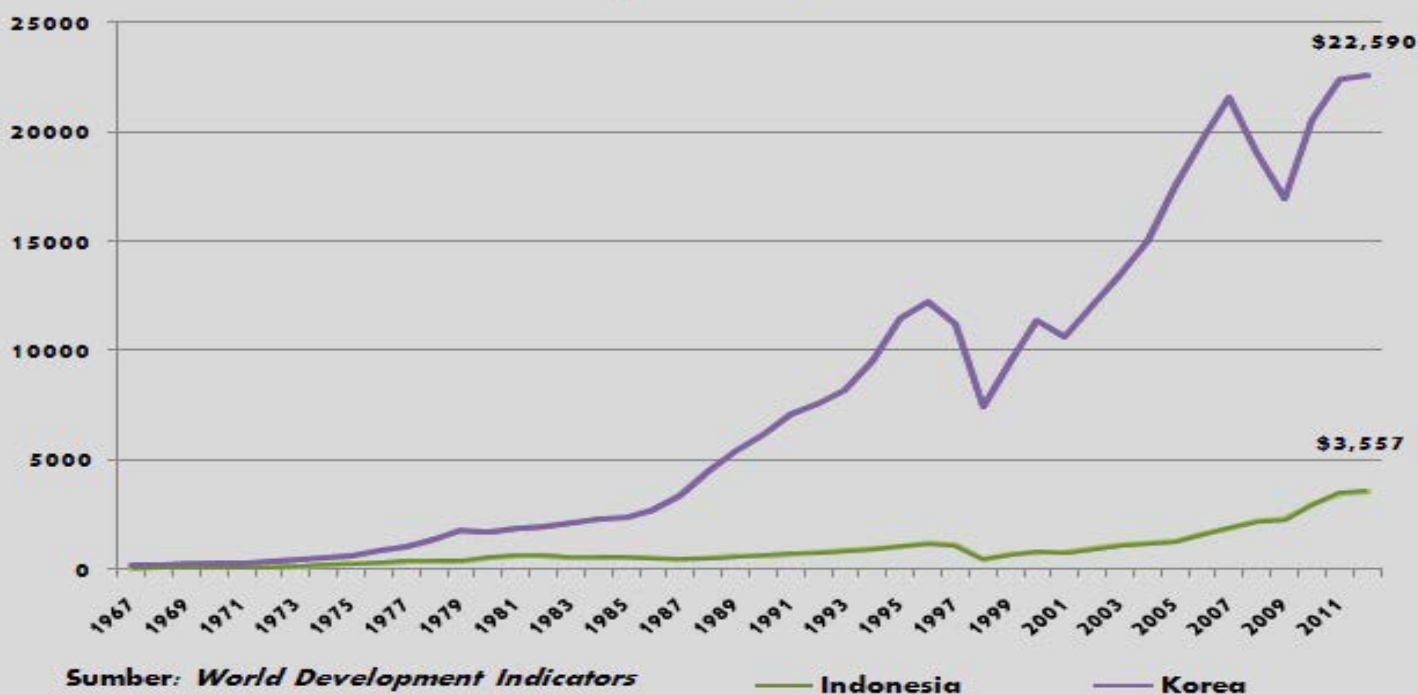
Huntington tells how closely the economic data of Ghana and South Korea in the early 1960s. The two countries have equal Gross Domestic Product (GDP) per capita; their economic portion are similar among products,

manufacturing, and primary services; as well as an abundance of primary product exports, with South Korea producing small quantities of manufactured goods. They also receive economic assistance in an equal amount. Thirty years later, South Korea becomes economic giant, number 14 in the world, multinational corporations, they export cars, electronic equipment, and other sophisticated goods in large amounts, with the income per capita is approaching Greece (now it's been far surpassed Greece). There is no such change in Ghana, with the GDP per capita is now around the one-fifteenth of South Korea.

South Korea (ROK) is currently growing as countries with advanced economies, particularly in the industrial sector. Innovations in technology are the key for South Korea to be become an advanced nation. Although South Korea is not a big country, but become the sixth largest exporter in the world. Transformation of economic development has transformed South Korea into a country with technological innovation. South Korea has a culture of innovation to support the advancement of the country in which the main elements are the foundation of education. According to the Economist Intelligence Unit, South Korea is ranked number 2 as the best nation in the education system in the world, after Finland. In 2009, South Korea has 323,000 researchers, increased 2.5 times in number than in 1997. Moreover, the South Korean people are known to have a very high work ethic. In 2012, the country is known to have the longest

The Role of Culture in Achieving Independence of the Defense Industry

PDB per Kapita





mempunyai waktu kerja terpanjang di antara Negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Budaya kerja keras tersebut disertai pula dengan budaya inovasi. Korea Selatan dikenal memiliki tendensi untuk menjadi World Pioneer dibandingkan menjadi Fast Follower. Dalam skala 0-100, Korea Selatan memiliki nilai 76,5 dalam hal tingkat teknologi industrinya. Secara makro Korea Selatan menghabiskan sekitar 3,57% dari PDB-nya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,”.

Mochtar Lubis dalam bukunya “Transformasi Budaya Untuk Masa Depan” juga melihat bahwa dalam proses industrialisasi rumpun budaya Tiongkok unggul dibandingkan dengan rumpun budaya Melayu. Budaya Tiongkok mengandung nilai kerja keras, pandai dan gigih menyimpan, bersedia menjalani penderitaan untuk menggapai kesuksesan, penghormatan terhadap nenek moyang dan orangtua yang memberikan kemantapan identifikasi diri dan hubungan sosial.

Sekarang kita menoleh sejenak ke Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis, terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan luas 1.922.570 km² dan dihuni oleh lebih dari 220 juta jiwa dari berbagai suku bangsa, agama dan latar belakang yang berbeda pula. Negara seperti ini membutuhkan satu upaya pertahanan yang sangat tangguh untuk melindungi rakyat, wilayah dan kedaulatannya dengan mengerahkan segenap kemampuan agar tidak jatuh ke dalam penguasaan dan pendudukan negara lain. Untuk memenuhi kewajiban ini, Negara memerlukan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang cukup baik dari segi kuantitas dan juga kualitasnya, karena alutsista adalah salah satu pilar dari kemampuan angkatan bersenjata. Namun dari realita

yang ada, kondisi alutsista yang dimiliki TNI ditinjau dari kualitas sebagian besar sudah melewati batas maksimum operasional dan jumlahnya pun terbatas. Oleh karena itu peran industri pertahanan dalam negeri sangat penting.

Indonesia telah bertekad mandiri dalam industri pertahanan nasional dengan memproduksi sendiri kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dalam berbagai kesempatan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan bahwa Indonesia memegang tiga prinsip dalam membangun bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Pertama, kalau negara ingin kuat, politiknya harus bermartabat. Kedua, ekonomi harus tumbuh pesat. Ketiga, ada kemampuan pertahanan.

Kemandirian sebuah industri pertahanan akan dapat meningkatkan posisi daya tawar Indonesia di dunia internasional, kerahasiaan alutsista terjaga, dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, karena dengan kemajuan industri pertahanan akan mampu menyerap tenaga kerja, mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara internal, bahkan dimungkinkan untuk mengekspor ke luar negeri. Ini memberikan manfaat efisiensi penggunaan anggaran belanja negara bahkan dapat meningkatkan devisa negara. Secara teknis, dengan menggunakan alutsista produk dalam negeri akan memungkinkan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan produk sehingga semakin hari semakin sempurna. Tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan suku cadang yang mudah dan cepat diperoleh. Ditambah pula kecepatan dalam melakukan perbaikan jika ada alutsista yang rusak. Yang paling menonjol adalah terhindarnya kita dari kebijakan embargo oleh negara produsen. Tentu masih segar dalam ingatan kita, ketika embargo dilakukan oleh Amerika

working hours in the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Culture of hard work is followed by a culture of innovation. South Korea is known to have a tendency to become World Pioneer rather than Fast Follower. On a scale of 0-100, South Korea has a value of 76.5 in terms of the level of industrial technology. In macro South Korea spends about 3.57% of its GDP to research and development activities.

Mochtar Lubis in his book "Transforming Culture for the Future" also see that in the process of industrialization, the Chinese culture clump is more superior to Malay culture clump. Chinese culture contains the value of hard work, clever and good at saving, willing to suffer to reach success, respect for ancestors and parents that provide constancy of self-identification and social relationships.

Now we turn briefly to Indonesia, the largest archipelago in the world that lies in a strategic position, stretching from Sabang to Merauke, which consists of 17,508 islands. With an area of 1.922.570 km² and is inhabited by over 220 million people of various ethnic, religious and different backgrounds. Country such as this requires a very strong defensive effort to protect the people, territory and sovereignty by deploying all the ability in order not to fall into the possession and occupation of other countries. To fulfill this obligation, the nation requires the primary weapon system (defense equipment) which is quite good in terms of quantity and quality, because the primary weapon system is one of the pillars of the ability of the armed forces. However, from the current reality, the primary weapon system that is owned by TNI in terms of the quality of most of it already reached its maximum limit and the number is limited.

Therefore, the role of the domestic defense industry is very important.

Indonesia has been determined to be independent in the national defense industry by producing our own primary weapon system (defense equipment). On many occasions, President Susilo Bambang Yudhoyono gave directives that Indonesia holds three principles in building and maintaining the sovereignty of the nation state. First, if the country wants to be strong, politics should be dignified. Second, the economy should grow rapidly. Thirdly, there is the ability of the defense.

The independence of a defense industry will be able to increase the bargaining power of Indonesia in the international world. The secrecy of primary weapon system will be maintained and can increase the economy of Indonesia, because the progress of the defense industry will be able to absorb the workforce, able to meet the needs of defense equipment internally, it is even possible to export to overseas. This provides the benefits of efficient use of the state budget and may even increase state income. Technically, the use of domestic products weapon systems will allow for continuous improvement of the products to become perfect. Equally important is the availability of spare parts that easily and quickly obtained. Coupled speed in performing repairs if damaged. The most prominent is avoiding us from the embargo policy by producing countries. Of still fresh in our memory, when the embargo is done by US to Indonesia over allegations that the Indonesian violate human rights. At that time, many of our weapons cannot be used, because the spare parts are not available. Fulfilling all the benefits already mentioned, the independence of the defense industry





industri dan pemerintah, TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) sebagai pengguna juga turut serta dalam pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe. Dengan demikian TNI tidak hanya berfungsi sebagai pemberi proyek, melainkan turut serta mengembangkan produk sesuai kebutuhan. Ini berarti masalah ergonomi dapat diterapkan serta melekat pada setiap desain. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga telah membuat master list alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terdiri atas 18 alutsista, antara lain kendaraan tempur, MKS, propelan, roket, senjata, kapal perang atas air, kapal selam, radar, satelit, peluru kendali, dan lain-lain.

kepada Indonesia atas tuduhannya bahwa Indonesia melanggar hak azasi manusia. Saat itu banyak senjata kita yang tidak dapat digunakan, karena suku cadang yang tidak tersedia. Menggenapi semua manfaat yang telah disebutkan, kemandirian industri pertahanan secara tidak langsung meningkatkan rasa nasionalisme, karena akan tampak kemampuan negara dalam menyiapkan kebutuhan untuk menjaga negaranya.

Dengan diberlakukannya UU No.16/2012 maka secara formal sudah ada panduan untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri. KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) bersama 3 stake holder yaitu Pembuat Kebijakan, Industri dan Pengguna diharapkan mampu membangun sinergitas yang mampu membawa industri pertahanan ke arah yang dicita-citakan, yaitu industri yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri bahkan juga mampu memenuhi kebutuhan dunia.

Konsep di atas merupakan hubungan kemitraan yang terpadu dan terkonsentrasi dalam pengembangan industri pertahanan dimana industri pertahanan merupakan suatu sistem dimana ada unsur-unsurnya yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yakni antara Perguruan Tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki potensi untuk mengembangkan lptek pertahanan dari dalam, Industri yang mempunyai potensi untuk mendayagunakan lptek oleh BUMNIP yaitu PT PAL yang bergelut di bidang alutsista matra (medan) Laut. PT Pindad di bidang alutsista matra darat, PT DI menangani burung besi tempur dan segala macam pendukungnya, PT Krakatau Steel yang menangani logam dan bahan kimia, PT LEN Industri menangani komponen elektronik khusus alat tempur, dan PT Dhana mengurus soal bahan peledak dan hulu ledak. Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) ini didukung oleh perusahaan swasta.

Berdasarkan prinsip kemitraan antara pengguna,

Undang-undang Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan menuntut Indonesia harus siap memproduksi sendiri alutsista di dalam negeri. Impor hanya dilakukan untuk senjata dan alutsista yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan itupun harus ada syarat adanya alih teknologi agar dalam waktu tertentu semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. Kemandirian industri pertahanan nasional ini akan mewujudkan kemampuan menjamin ketersediaan Alutsista sehingga kemandirian pertahanan negara dan keutuhan kedaulatan NKRI akan terjaga. Terdapat tiga hal yang dapat dicapai ketika Indonesia sudah mandiri dalam industri pertahanan, yakni kemampuan dalam membuat/mengintegrasikan Alutsista, kebebasan dalam memilih Sumber Material/ Sistem/Teknologi, dan ketidaktergantungan terhadap berbagai ikatan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 maka perwujudan kemandirian industri pertahanan tinggal menunggu waktunya. Masalahnya sekarang terletak pada budaya yang dikembangkan oleh masing-masing stake holder. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Huntington yang melihat betapa besarnya peran budaya dalam mencapai suatu keberhasilan. Korea Selatan dengan budayanya membuatnya unggul dibandingkan Ghana. Demikian juga Mochtar Lubis melihat bagaimana rumpun budaya Cina mampu membawa negaranya unggul dalam proses industrialisasi dibandingkan dengan rumpun Melayu.

Budaya yang perlu dikembangkan yang dapat mendukung perwujudan kemandirian industri pertahanan harus digali dan direvitalisasi. Unsur industri pertahanan yang terdiri dari BUMNIP dan didukung oleh perusahaan swasta, perlu mengembangkan budaya "gotong royong" yang sebenarnya merupakan nilai budaya bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu kala, namun saat ini mengalami degradasi, menuju ke arah individualistik. Dengan kerja sama yang diawali keterbukaan dan kejujuran akan menciptakan relasi simbiosis mutualistik antar BUMNIP dan perusahaan swasta. Nilai budaya

indirectly increases the sense of nationalism, as it would appear the country's ability in preparing the needs to protect the country.

With the enactment of the Act No.16/2012, formally there are guidelines to realize the independent defense industry. KKIP with three stake holders namely policy makers, industry and users are expected to build a synergy that is able to bring defense industry toward expected, that is industry which is able to meet the needs of the domestic defense equipment even the world.

The above concepts are partnership, which is integrated and concentrated in the development of the defense industry. The defense industry is a system whose elements are interrelated and influence each other, i.e., between universities and R & D community that has the potential to develop the science and technology of defense from inside, the industry has the potential to harness science and technology by BUMNIP that is PT PAL who deals in sea weapon systems.



PT Pindad handles land weapon systems, PT DI handles all kinds of aircraft and its supporting equipment, PT Krakatau Steel handle metal and chemicals, PT LEN Industry handle electronic components, and PT Dhana handle explosives and warheads. These BUMNIP are supported by private companies.

Based on the principle of partnership between users, industry and government, the military (Army, Navy and Air Force) as users also participated in the development of the design to produce a prototype. Thus, the military not only serves as a conduit of the project, but also participate in developing the products as needed. This means that the ergonomics problem can be applied and attached to each design. Government as policy makers have also made a master list of weapon systems (defense equipment) consisting of 18 defense equipment, among other combat

vehicles, MKS, propellants, rockets, guns, warships, submarines, radar, satellites, missiles, and others.

Act No. 16/2012 on the Defense Industry demands Indonesia to be ready to produce its own weapon system. Import only done for weapons and defense equipment that cannot be produced in the country, and even then there should be a requirement that the transfer of technology within a certain time so everything can be produced domestically.

The independence of the national defense industry will acknowledge the ability to ensure the availability of weapon systems so that the independence of the country's defense and sovereignty of Homeland will be maintained. There are three things that can be achieved when Indonesia has been independent in the defense industry, the ability to create / integrate weapons systems; the freedom in choosing resources (Materials / Systems / Technology); and the independence of the various bond.

Referring to Act No. 16 of 2012, the embodiment of the independence of the defense industry is just a matter of time. The problem now lies in the culture developed by each stakeholder. This is consistent with that presented by the Huntington's that see how big the role of culture in achieving success. South Korea with its culture makes it superior than Ghana. Similarly, Mochtar Lubis see how the Chinese culture clumps capable of bringing the country to excel in the process of industrialization compared to Malay clumps.

The cultures that need to be developed that can support the realization of the independence of

the defense industry should be dug up and revitalized. Element of the defense industry which consists of BUMNIP and supported by private companies, need to develop a culture of "mutual aid" which is actually a value of Indonesian culture that existed long time ago, but currently degraded, leading toward individualistic.

With the cooperation that begins with openness and honesty will create a symbiotic mutualism relationship between BUMNIP and private companies. Cultural value of "hard work" and "smart working" is a value that must be adhered to and continues to be maintained and developed, due to the hard work and smart work, enabling the defense industry to increase productivity both in quantity and quality effectively and efficiently. It will be able to improve the image of BUMNIP which is unhealthy and problematic in terms of managerial and financial industry so that cannot compete with the defense

“kerja keras” dan “kerja cerdas” adalah nilai yang harus dipegang teguh dan terus dipelihara dan dikembangkan, karena dengan kerja keras dan kerja cerdas, memungkinkan industri pertahanan mampu meningkatkan produktifitasnya baik dari kuantitas maupun kualitas secara efektif dan efisien. Hal ini akan dapat memperbaiki citra BUMNIP yang tidak sehat dan bermasalah dari segi manajerial maupun financial sehingga kalah bersaing dengan industry pertahanan dari negara lain. Nilai-nilai ini akan mampu pula meningkatkan hingga 70% kapasitas teknologi, financial dan produksi sistem senjata, sehingga secara keseluruhan kemandirian dapat terwujud.

Demikian pula akademisi dan pranata Litbang, harus meninggalkan budaya “nerabas” yang sedang menggejala. Budaya yang perlu dibangun adalah budaya yang “berorientasi pada kualitas” sehingga pranata litbang melakukan penelitian dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah baik dari segi metodologi dan kompetensi peneliti. Sumber daya litbang senantiasa dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi, yang memampukannya melakukan analisa yang tepat terhadap fenomena yang ada di lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional. Pengetahuan teoritis diperdalam terus untuk memampukannya memiliki pisau analisa yang tepat. “Belajar sampai ke negeri Tiongkok” adalah ungkapan yang mendukung nilai “terus belajar” yang memampukan peneliti menggali ilmu dan berupaya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah Pembuat Kebijakan. Bagaimana pembuat kebijakan, Kemhan dengan kebijakannya untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain, membuat kebijakan penggunaan oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Nilai budaya “saling menolong” dapat dikembangkan sehingga setiap aparatur yang terlibat dalam kegiatan ini selalu digerakkan oleh nilai budaya merupakan pola pikir yang menjadi pedoman ketika berperilaku. Demikian pula nilai “bangga akan produk Indonesia” harus diyakini dan dikembangkan, sehingga walaupun saat ini secara finansial tidak ekonomis, namun harapan bahwa itu adalah proses menuju hasil yang lebih baik, memampukannya untuk membuat kebijakan yang pro-produk industri pertahanan dalam negeri.

Unsur ketiga adalah pengguna yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jika selama ini kita dengar “western minded” yang merasa bangga dengan produk asing (Barat), maka saatnya kita bangkit untuk “bangga dengan Produk Indonesia”. Hal ini sesungguhnya tidak sulit di negara yang bersifat paternalistik dan berorientasi ke atas. Para pemimpin, orang-orang yang dituakan menjadi panutan dan pusat orientasi. Jika para pemimpin menggunakan produk tersebut, strata yang ada di bawahnya dengan tanpa pikir panjang mengikutinya. Itu berarti para pemimpin di lingkungan TNI harus yakin bahwa menggunakan Alutsista produk dalam negeri adalah baik. Mungkin dari segi kualitas produk yang digunakan masih kurang dibandingkan dengan produk luar negeri. Namun dengan keyakinan bahwa melalui penggunaan produk tersebut, akan dapat diketahui kelemahannya untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan menuju kesempurnaan produk



tersebut sampai memberi manfaat yang optimal. Nilai “sabar” yang sering dianggap sudah ketinggalan jaman, memungkinkan pengguna untuk melihat secara seksama kelemahan-kelemahannya dan berupaya secara teoritis dan teknis memberikan masukan-masukan kepada industri dan pranata litbang untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Dengan dasar nilai “bangga produk Indonesia” menghindarkan para pejabat penentu kebijakan pembelian dari vested interest, kepentingan pribadi baik berupa materil maupun non materil.

Dengan melihat mekanisme kerja dari industri pertahanan dibutuhkan proses revitalisasi dan pembudayaan nilai-nilai budaya yang dianggap mampu mendukung perwujudan kemandirian industri pertahanan. Saya menyebutkannya sebagai revitalisasi, karena sesungguhnya nilai-nilai itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun sudah mengalami penurunan. Sedangkan nilai-nilai yang dianggap baru seperti “kerja keras dan kerja cerdas” dibutuhkan pembudayaan sehingga setiap individu yang terlibat dalam mekanisme industri pertahanan memiliki nilai-nilai itu, yang memandunya dalam bertindak dan berkarya.

Proses revitalisasi dan pembudayaan (enkulturasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sosialisasi dengan berbagai media, pendidikan formal dan informal, keteladanan, pemberlakuan sistem dan norma kerja, semuanya dapat berfungsi sebagai sarana dalam menciptakan dan mengembangkan budaya yang akan mampu mencapai apa yang diharapkan. Karena sesungguhnya dari 3 unsur kebudayaan (sistem nilai, sistem perilaku dan sistem karya), yang mempengaruhi perilaku dan karya manusia serta yang paling lama bertahan adalah sistem nilai. Dengan demikian jika nilai-nilai yang telah disebutkan di atas dijadikan sebagai pedoman untuk mendorong perwujudan kemandirian industri pertahanan, maka UU Nomor 16 tahun 2012 (yang merupakan norma panduan dalam menjalankan kemandirian industri pertahanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah) dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan dengan kesadaran dan keyakinan. Jika sesuatu dilakukan berdasarkan kesadaran dan keyakinan, niscaya akan memberikan hasil yang optimal.

industry of other countries. These values will also be able to increase the capacity of the technology, financial and production of weapon systems by 70%, so that the overall independence can be realized.

Similarly, academia and R & D institutions should leave the culture of "bypass" which is in trend. The culture



that needed is a "quality-oriented" culture so that R & D institutions conducting research by following the scientific principles both in terms of methodology and research competence. R & D resources are always filled with high curiosity, which enabled to carry out a proper analysis of the phenomena within the strategic environment both nationally, regionally and internationally. Theoretical knowledge continuously deepened to enable them to have the right analytic tool. "Study up to China" is a phrase that supports the value of "keep learning" that enables researchers explores science and strives to create something useful for the nation and the state.

Another element that is not less important is the policy maker. How can policy-makers, the Ministry of Defense with its policy to carry out cooperation with other countries, to make policy on the use by TNI (Army, Navy and Air Force). Cultural value "mutual help" can be developed so that each apparatus involved in these activities are always driven by a mindset of cultural values as a guide when it behave. Similarly, the value of "proud of Indonesian products" should be believed and developed, so that although currently financially uneconomical, but hope that it is a process towards better results, enabled it to make policies that support domestic defense industry products.

The third element is the user namely Army, Navy and Air Force. If during the time we hear "western minded" who like foreign products (Western products), then it is time we got up to "proud of Indonesian products". It is actually not difficult in a country that is paternalistic and upwards oriented. The leaders and the elders become a role model. If the leaders are using these products, others will follow. That means the TNI leaders should

be sure that using local made weapon systems is better. Maybe in terms of quality of products used are less than the foreign products. However, with the belief that through the use of the product, we will find weaknesses, which can be improved to perfection of these products to provide optimum benefits. Value of "patient" which is often considered outdated, enabling users to see weaknesses carefully and make efforts to provide theoretical and technical inputs to the industry and R & D institutions to make improvements.

On the basis of the value of "proud Indonesian products" to avoid official policy-makers from vested interests either material or non-material.

By looking at the working mechanism of the defense industry, it is needed revitalization process and civilizing values, which are considered able to support the realization of the independence of the defense industry. I mention it as a revitalizing, because the real values that are already owned by the people of Indonesia, but is declining. While the values of the new deemed as "hard work and smart work" is needed civilizing so that each individual involved in the mechanism of defense industry has those values, which guide them in the act and work.

Revitalization process and acculturation (enculturation) can be done in various ways.

- Socialization with a variety of media, formal and informal
- education, exemplary, the implementation of the system
- and work norms, all of which can serve as a means of



- creating and developing a culture that will be able to
- achieve what is expected. For verily of 3 elements of
- culture (value system, the system behavior and system
- works), which affects the behavior and work of the
- man and the longest is the value system. Thus if the
- values mentioned above serve as guidelines to push the
- embodiment of the independence of defense industry,
- the Act No. 16 of 2012 (which is the manual norm in
- implementing the independence of defense industry as
- outlined in Government Regulation) can be performed
- well by all stakeholders with awareness and confidence.
- If something is done based on the awareness and
- confidence, undoubtedly it will provide optimal results.

Presiden Indonesia selama ini dalam melaksanakan perjalanan tugasnya ke dalam atau keluar negeri masih menggunakan pesawat sewaan milik Garuda Indonesia. Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan dalam berbagai aspek, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli sebuah pesawat Kepresidenan jenis 737-860 Boeing Business Jet (BBJ) 2.

Pemerintah Indonesia berkerjasama dengan Amerika setidaknya menghabiskan sekitar 847 miliar rupiah menggunakan anggaran Sekretariat Negara untuk pembuatan pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 2 ini. Meskipun menghabiskan dana yang sangat tinggi untuk pembelian pesawat tersebut namun dengan adanya pesawat Kepresidenan sendiri, Negara Indonesia dapat menghemat hingga 300 persen. Hal ini dikarenakan untuk menyewa pesawat Garuda Indonesia untuk satu periode pemerintahan seorang Presiden saja, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sekitar 500 miliar. Ada sejumlah alasan dalam pemilihan Boeing ketimbang jenis lain yakni membeli pesawat Boeing lebih menguntungkan, karena pesawat Boeing lebih familiar untuk digunakan pada pilot di dalam negeri termasuk pilot TNI AU, selain itu fasilitas dan kemampuan perawatan dalam negeri lebih siap dan memiliki kapasitas yang memadai dibandingkan pesawat merek lain.

Kamis 10 April 2014, pesawat BBJ II tiba di Indonesia, di Lanud Halim Perdanakusuma. Pada kesempatan ini pesawat tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, sekaligus disertifikasi oleh Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang selanjutnya diserahkan kepada Angkatan Udara yang diterima oleh Kasau Marsekal TNI I.B. Putu Dunia untuk perawatannya. Dalam acara penyambutan dan serah terima pesawat tersebut Sudi Silalahi mengatakan bahwa ini adalah peristiwa penting untuk Indonesia, "Hadirnya pesawat ini membuka sejarah baru bagi Indonesia setelah 69 tahun merdeka, dengan memiliki pesawat kepresidenan sendiri".

Pesawat Boeing Business Jet II untuk Presiden RI ini diproduksi oleh Boeing

Company sejak 2011. Pesawat berwarna Biru putih ini memiliki tangki bahan bakar yang telah ditambah untuk daya jangkau sampai dengan 10.000 kilometer. BBJ II pun sudah dirancang untuk memuat 4 VVIP class meeting room, 2 VVIP class state room, 12 executive area, dan 44 staff area. Interior pesawat dirancang untuk dapat mengakomodasi hingga 67 orang penumpang. Jumlah tersebut cukup untuk sebuah rombongan presiden dan sudah dapat menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden RI. Pesawat BBJ2 didesain untuk keperluan very important person (VVIP) yakni berkonfigurasi mewah dengan keberadaan kamar tidur utama, toilet yang dilengkapi shower, ruang konfrensi, ruang makan dan ruang tamu.

Perbandingan pesawat "Garuda" RI-1 dengan "Air Force One" Amerika Serikat. Pihak gedung putih dan boeing selaku produsen pesawat "Garuda" RI-1 mempublikasikan secara terbuka, mulai dari sejarah, penamaan, spesifikasi teknis, hingga keamanan. Berikut beberapa perbedaannya :

Sejarah

Penggunaan pesawat kepresidenan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sangat berbeda . Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, sejak merdeka 69 tahun lalu, Indonesia belum pernah memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Selama ini, Presiden-Wapres Indonesia menggunakan pesawat sewaan dari maskapai Garuda Indonesia atau milik TNI AU untuk berpergian antar provinsi atau luar negeri.

Menurut SBY sering 800 NG Sedangkan internasional p a b r i k a n

Garuda Indonesia, Presiden menyewa Pesawat jenis 737- untuk penerbangan domestik. untuk jarak jauh atau menggunakan Pesawat Airbus jenis A330.



Indonesia memiliki Pesawat Kepresidenan

Update

Oleh/by : Drs. Zul Asril
Kasubbid Kermalem bid. Kermainfo PuskomPublik

President of Indonesia is still using leased aircraft owned by Garuda Indonesia in carrying out his duties domestically and abroad. In the end, with the various considerations in various aspects, the Indonesian government decided to buy a presidential plane type Boeing 737-860 Business Jet (BBJ) 2. Indonesian government in collaboration with the U.S spends at least about 847 billion dollars, using the State Secretariat budget to build the Presidential plane Boeing Business Jet 2. Despite the very high spending funds for the purchase of this aircraft, but by having own presidential aircraft, Indonesia can save up to 300 percent. This is due, to lease a Garuda Indonesia for one period of the presidential administration, the government has issued a budget of about 500 billion. There are a number of reasons for the selection of Boeing than any other kind, to buy Boeing is more profitable, because Boeing is more familiar for domestic pilots including Air Force pilots, in addition, the facilities and capabilities of domestic maintenance are better prepared and have sufficient capacity compared to other aircraft brands. On Thursday, 10 April 2014, the presidential plane arrived in Halim Perdanakusuma air base. On this occasion, the aircraft was inaugurated by the Secretary of State Sudi Silalahi, at once certified by the Ministry of Defence and further will be transferred to the Air Force and received by Air Chief Marshal IB Putu Dunia for maintenance. In the welcoming ceremony and handover of the aircraft, Sudi Silalahi said that this is an important event for Indonesia, "The presence of this aircraft opens a new history for Indonesia after 69 years of independence, by having own presidential aircraft".

The Boeing Company manufacture Business Jet II aircraft since 2011. This sophisticated aircraft has a wingspan of 35.79 meters, 12.50 meters high and 38 meters long. Fitted with 2 CFM 56-7

engines and capable of flying at a maximum altitude of 41,000 feet, is capable of flying for 10 hours, has a maximum cruise speed of Mach 0.785 and a maximum speed of mach 0.85. The blue and white colored aircraft is also equipped with sophisticated weaponry such as the joint direct attack munitions (JDAM), small diameter bomb (SDB), automatic cannon M61A2 Vulcan 20 mm, and an anti-missile. Furthermore, the fuel tank capacity has been added to a range of up to 10,000 kilometers. The plane was already designed to carry four VVIP class meeting room, two VVIP class state rooms, 12 executive areas, and 44 staff areas. Plane interior is designed to accommodate up to 67 passengers. The amount is enough for a presidential entourage and is able to support the Presidential duties. The plane is designed for VVIP that is configured with a master bedroom, a toilet that has a shower, conference room, dining room and living room.

History

The use of the presidential plane between Indonesia and the United States (U.S.) is different. According to the State Secretary Sudi Silalahi, since independence 69 years ago, Indonesia has never had its own presidential aircraft. During this time, the President and Vice President of Indonesia using leased aircraft from Garuda Indonesia or Air Force to travel within the country and abroad.

According to Garuda Indonesia, the President often lease 737-800 NG for domestic flights. While for long distance or international flights using Airbus A330. Meanwhile, the President of the United States have started using a special aircraft at least from 1943. At that time, President Franklin D.Roosevelt flown using Boeing Model 314 Clipper. Afterwards, the Presidential aircraft became more sophisticated. By 1963, Boeing introduced the 707-320B Special Air Mission (SAM) 26000 and



Indonesia Operates Air force One

Sementara, Presiden Amerika Serikat sudah mulai menggunakan Pesawat khusus setidaknya dari tahun 1943. Kala itu, Presiden Franklin D.Roosevelt terbang menggunakan Pesawat Boeing model 314 Clipper. Setelahnya, Pesawat Kepresidenan pun semakin canggih. Tahun 1963, Boeing memperkenalkan pesawat berjenis 707-320B Special Air Mission (SAM) 26000 dan 27000. Pesawat Jet ini lebih modern hampir tujuh masa kepemimpinan Presiden menggunakan pesawat tersebut. Untuk saat ini, Pesawat yang kerap digunakan Presiden AS adalah berjenis 747-200B SAM 28000 dan 29000.

Penamaan pesawat

Banyak yang salah memahami arti Air Force One. Menurut situs resmi Gedung Putih, sebutan Air Force One dipakai untuk semua Pesawat Jet yang digunakan oleh Presiden AS, apapun jenisnya. Nama tersebut digunakan sebagai kode untuk alat angkut udara Presiden. Meski begitu, pihak Gedung Putih mengakui ada Pesawat regular "Air Force One" yang kerap digunakan Presiden. Pesawat itu yang berjenis Boeing 747-200B dan memiliki dua kode ekor yakni 28000 dan 29000. Pesawat Air Force One sudah beberapa kali mampir ke Indonesia. Terakhir, saat Presiden Barack Obama mengikuti acara East Asia Summit tahun 2011 di Bali. Untuk Pesawat Kepresidenan RI baru belum diketahui apakah ada penamaan dengan kode tertentu. Selama ini, Pesawat itu lebih sering dengan Pesawat Kepresidenan RI atau Pesawat RI-1. Di undangan yang dikirim ke wartawan, Mensesneg Sudi Silalahi menyebut pesawatnya dengan nama "Pesawat Kepresidenan BBJ-2".

Spesifikasi Pesawat RI-1; Mesin: 2 Mesin CFM56-7, Sejarah pesawat pembuatan dilakukan sejak tahun 2013 (Date Manufacture). Kemampuan terbang: Ketinggian maksimum: 41.000 Feet, Endurance (Daya Jelajah): 10 Jam, Kecepatan jelajah maksimum: 0,785 March, Kecepatan maksimum: 0,85 March, Jangkauan jelajah maksimum: 4.620 Nm/8.556 Km. Ukuran pesawat: Rentang sayap: 35,79 Meter, Panjang badan: 38 meter, Tinggi pesawat: 12.50 meter. Ukuran lain-lain: Data muat: 4 VVIP Class Meeting Room, 2 VVIP Class (State Room), 12 Excutive Area dan 44 Staf Area.

Spesifikasi Air Force One; Jumlah kru: 26 penumpang/kru dengan kapasitas maksimal hingga 102 orang. Panjang pesawat dari hidung sampai ekor mencapai 70,4 meter. Tinggi pesawat 19,4 meter. Luas ruang kabin dalam pesawat 371, 6 meter persegi. Berat pesawat 400 ton. Mesin: General Electric CF6-80C2B1. Dari situs gedung putih disebutkan, Pesawat ini mampu mengisi bahan bakar di udara. Karena itu daya jelajahnya tak terbatas. Bisa membawa Presiden AS kemana pun dia hendak pergi. Ada sejumlah ruangan di dalamnya, mulai dari kantor Presiden, toilet dan ruang konfrensi. Ada juga ruang medis khusus yang bisa difungsikan sebagai kamar operasi, tentu saja dengan dokter di dalamnya. Sebuah dapur khusus juga tersedia untuk memberi makan 100 orang sekaligus. Total ruangan di pesawat itu luasnya mencapai 4.000 kaki persegi. Di dek tingkat pertama, dijadikan ruang kargo dan bagasi, dek tingkat dua di



Sumber: www.kuinfo.com

dominasi ruang kerja presiden dan staf, sementara dek tingkat ketiga dipakai untuk kokpit, lounge dan ruang komunikasi.

Keamanan

TNI AU menyebut Pesawat Kepresidenan RI memiliki spesifikasi keamanan yang canggih, Boeing Business Jet-2 yang di dominasi warna biru itu mampu mendeteksi rudal atau peluru kendali yang mendekat. "dalam aspek security", jika ada ancaman peluru kendali pesawat ini memiliki sensor sehingga memberikan warning untuk langkah selanjutnya", kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI IB Putu Dunia.

Letkol (Pnb) Firman, salah satu perwakilan TNI AU yang ikut dalam penerbangan dari AS tersebut mengatakan, Pesawat Kepresidenan RI bisa mengetahui juga keberadaan pesawat lain. Radar yang dipasang di dalamnya sangat canggih. Sayangnya, burung besi itu tak punya fungsi perlawanan.

Bagaimana dengan Air Force One ? dalam situs resmi Gedung Putih disebutkan, sistem elektronik Pesawat tersebut disebut terlindungi dari getaran elektro magnetik. Pesawat juga memiliki system komunikasi yang terlindungi dari penyadapan. Sedikitnya ada 87 sambungan telepon berbeda di dalam dan 28 di antaranya aman.

Air Force One juga memiliki peralatan anti rudal, pesawat ini memiliki alat khusus yang bisa membutakan rudal pencari infra merah. Sejumlah alat yang terpasang di dalamnya diklaim bisa mengacak sinyal rudal. Masih banyak spesifikasi keamanan lain yang dirahasiakan.

Harga unit, dari situs Wikipedia, diketahui harga satu Pesawat Air Force One Boeing 747-200B VC-25 senilai US\$ 325 juta. Ada dua pesawat yang dibangun dengan spesifikasi sama, yakni nomor ekor SAM 28000 dan 29000. Dua pesawat tersebut kini dikelola oleh pihak militer AS. Setiap perjalanannya adalah bagian dari misi militer, sedangkan harga pesawat kepresidenan RI-1 lebih murah yaitu Rp 840 Miliar. Mmenurut Mensesneg Sudi Silalahi, nilai itu terdiri dari biaya pesawat dan pembuatan interior. Pesawat sudah dibangun sejak tahun 2013 lalu.



27000. This plane is more modern and being used for almost seven presidency. The current U.S presidential plane is Boeing 747-200B SAM 28000 and 29000.

The naming of the plane

Many misunderstood the meaning of Air Force One. According to the official website of the White House, Air Force One is the designation used for all aircraft used by the U.S. President, any kind. The name was used as code for the presidential air conveyance. Even so, the White House acknowledged there is a regular plane "Air Force One" which is often used by President. The plane is a Boeing 747-200B that has two tail codes 28000 and 29000. Air Force One has several times come to Indonesia. The last time Air Force One to Indonesia is when President Barack Obama attended the East Asia Summit in Bali in 2011. For the new Presidential plane, is not yet known whether there is naming the specific code. All this time, the presidential plane was more frequent called RI-1. At the invitation sent to journalists, State Secretary Sudi Silalahi mentioned the plane with the name "Presidential Aircraft BBJ-2".

Comparison :

Spec	Air Force One	BBJ-2
Engine	GE CF6-80C2B1	CFM56-7
Altitude	45.100 feet	41.000 feet
Cruising speed	0,84 mach	0,785 mach
Max Speed	0,92 mach	,85 mach
Range	6.800 Nm	4.620 Nm
Wing Span	59,68 m	35,79 m
Length	70,4 m	38 m
Height	19,4 m	12,50 m

The Air Force one is able to refuel in the air, so it

has unlimited range. There are a number of rooms in it, ranging from the President's office, restrooms, conference room, medical room (for surgery), communication room, and kitchen.

Security

Indonesian Air Force called the Presidential Plane has advanced security specifications. The Boeing Business Jet 2, which painted in blue, is able to detect an approaching missile. "If there is a missiles threat, this plane has sensors that will trigger warning to take the necessary steps," said Air Chief Marshal IB Putu Dunia. Lt. Col. Firman, one representative of the Air Force who participated in the flight from the U.S. said, the aircraft can also detect the presence of other aircraft. Radar mounted on the aircraft are very sophisticated Unfortunately, the plane does not have the capability of resistance. What about the Air Force One? The official website of the White House stated, the aircraft electronic system is protected from electromagnetic vibration. The aircraft also has a communication system that is protected from eavesdropping. There are at least 87 different phone lines in and 28 of them are safe.

Air Force One also has anti-missile equipment, these aircraft have special equipment that can blind the missile's infrared seeker. A number of equipments installed are claimed could scramble the missile signal. There are many other security specifications undisclosed.

According to Wikipedia, one unit of Air Force One Boeing 747-200B VC-25 is worth U.S. \$ 325 million. There are two aircrafts built with the same specifications, tail numbers 28000 and 29000. Two of these aircraft are run by the U.S. military. Each flight is part of the military mission. The price of the presidential plane RI-1 is cheaper, Rp 840 Billion. According to the State Secretary Sudi Silalahi, the value includes manufacturing and design interiors. The aircraft have been built since 2013.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

Oleh : Kolonel Tek. Gita Amperiawan PhD.

Sejarah Industri Pertahanan

Keberadaan alutsista merupakan elemen penentu supremasi kekuatan militer suatu negara. Adanya alutsista yang modern dan tercukupi akan berdampak pada eksistensi suatu negara tidak hanya pada martabat tetapi juga pada kedaulatannya. Karena itu pemerintah meyakini pentingnya pembinaan dan pengembangan Industri Pertahanan (Indhan) yang bertahap dan berlanjut agar mampu mendukung secara maksimal Pertahanan dan Keamanan Negara, melalui upaya pencapaian kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista bagi TNI dan Almatsus bagi Polri.

Jika menengok sejarah, Indhan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yang dimiliki oleh Hindia Belanda untuk mendukung aktifitas tentaranya. Dalam perkembangan selanjutnya Indhan mengalami pasang surut sesuai dinamika dan tuntutan sejarah, mulai dari proses nasionalisasi perusahaan eks asing (Hindia Belanda dan Inggris) pada awal kemerdekaan sampai dengan terbentuknya Industri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid-I yang dilanjutkan pada kabinet Indonesia Bersatu jilid-II. Beberapa catatan penting dalam dua dekade terakhir ini diantaranya adalah pada Tahun 1998, terjadi krisis moneter yang berdampak pada banyaknya industri nasional yang bangkrut, sehingga diterbitkan Keppres 64 tentang Penggantian Badan Pengelola Industri Strategis menjadi PT. Bahana Prakarya Industri Strategis (BPIS) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengkoordinasikan dan mengontrol seluruh saham 10 BUMN Industri Strategis. Krisis moneter berlangsung terus sampai tahun 2001, namun karena PT. BPIS dirasa belum bisa berperan sebagaimana layaknya holding company maka pada tahun 2001 kembali diterbitkan Keppres 45 tentang pembubaran PT. PT. BPIS. Era KIB jilid-1, BUMN Industri Strategis memperoleh prioritas utama untuk diberdayakan secara maksimal guna pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Kebijakan ini dimantapkan pada Era KIB Jilid-II, dengan dikeluarkannya Perpres 42 Tahun

2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan.

Fakta sejarah ini menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan pimpinan negara turut mempengaruhi pasang surut Industri Pertahanan. Industri Pertahanan akan bangkit jika ada kemauan, komitmen dan keberpihakan pemerintah, dan KKIP dibentuk untuk mengembalikan bangkitnya Industri Pertahanan.



Urgensitas Industri Pertahanan

Pembangunan Indhan dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari kemauan politik pemerintah dalam usaha untuk mencapai suatu urgensitas yang sangat penting dalam konteks pertahanan negara, yaitu memberikan efek deterrence bagi bangsa Indonesia sekaligus memberikan multiple effect baik economic effect maupun technology bagi Bangsa Indonesia. Diharapkan dengan Bergeraknya sektor Indhan maka akan dapat menggerakkan perekonomian nasional melalui terciptanya industri alat utama (lead integrator), industri komponen utama/ penunjang, industri komponen/pendukung dan industri bahan baku, sehingga prinsip bahwa defence supporting economy dapat juga diwujudkan dimasa yang akan datang. Tentu saja hal yang paling utama adalah tercapainya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.



monetary crisis continued until 2001, but due to the PT. BPIS still not able to act as befits a holding company in 2001, and then re-issued Presidential Decree 45 on the dissolution of the PT. BPIS. The era of the United Indonesia Cabinet-1, SOE Strategic Industries to be prioritized optimally empowered to fulfill the TNI's primary weapon system and police special material equipment. This policy was strengthened in the Era of United Indonesia Cabinet Volume-II, with the issuance of Presidential Decree 42 of 2010 on the Defense Industry Policy Committee (KKIP) as the body tasked to coordinate the formulation, implementation and control of national policies Defense Industry.

These historical facts show us that the policy of the state leaders also influence the tides of Defense Industry. Defense industry will rise if there is a will, commitment and concern of the government, and the rise of KKIP formed to restore the Defense Industry.

The Urgency of Defense Industry

Defense industry development is done as an expression of the political will of the government in an effort to achieve an urgency that is very important in the context of national defense, namely the deterrence effect for Indonesia, as well as providing multiple effects of economy and technology for Indonesia. It is expected that with the movement of the defense industry sector will be able to drive the national economy through the creation of a major appliance industry (lead integrator), the main / support component industry, components / support industry and raw material industry, thus supporting the principle that the defense economy can also be realized in the future. Of course, the main thing is to achieve self-sufficiency in meeting the needs of the TNI's primary weapon system and Police special material equipment.

Defense Capabilities and Industry Challenges

Currently the production of the defense industry, both state-owned and private enterprises has been enough to contribute to the fulfillment of the needs of the military and police and other agencies such as Basarnas and Bakorkamla. However, it should be recognized that the ability of the defense industry is still not able to contribute the maximum to achieve the fulfillment of defense equipment independently. Some things that need to be observed include the quality and production capacity has not been satisfactory for users, product delivery time is not yet fulfilled and the price is not competitive, defense technology spending remains largely imported and ability to penetrate the global market share is very limited. In terms of R & D investment, Defense R & D funding is still small and sporadic, not much research consortium is formed, so that the research is still generally ego - sectoral and push technology oriented and relationships among institutions is not yet collaborative, in this case R & D institutions, defense industry, universities and financing institution.

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT of DEFENSE INDUSTRY

The existence of a primary weapon system is the defining element of a country's military power supremacy. The existence of a modern and adequate primary weapon system will have an impact on the existence of a state, not only the dignity but also on its sovereignty. Because the government believes, it is important that the gradual and continuing of development of defense industry will be able to fully support the defense and State Security, through the achievement of self-sufficiency in meeting the needs of the primary weapon system for military and special material equipment for the police.

If you look at history, the defense industry in Indonesia has been around since before independence, which is owned by Dutch Indies to support their troop's activities. In a further development, defense industry experience ups and downs according to the dynamics and historical sequence, ranging from the nationalization of the former foreign company (Dutch Indies and English) at the beginning of independence until the formation of the defense Industry in the United Indonesia Cabinet-I followed by the United Indonesia Cabinet-II. Some important notes in the last two decades include In 1998, the monetary crisis impact on many national industries goes bankrupt, so the Presidential Decree 64 issued the Industry Strategic Management Board to PT. Bahana Prakarya Industri strategis (BPIS) replacement as the State Owned Enterprises (SOEs) that coordinate and control the entire stock of 10 SOEs Strategic Industries. The

Kemampuan dan Tantangan Industri Pertahanan

Saat ini produksi Indhan, baik BUMN maupun BUMS, telah cukup berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan TNI dan Polri maupun lembaga lain seperti Bakorkamla maupun Basarnas. Namun demikian, harus diakui bahwa kemampuan Indhan yang ada saat ini masih belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. Beberapa catatan yang perlu dicermati diantaranya adalah kualitas dan kapasitas produksi belum memuaskan pengguna, delivery time produk kepada pengguna yang masih belum ditepati serta harga yang tidak bersaing, belanja teknologi pertahanan sebagian besar masih diimpor dan kemampuan penetrasi terhadap pangsa pasar global yang sangat terbatas. Dari sisi investasi Litbang Pertahanan, pembiayaan Litbang Pertahanan masih kecil (small money) dan sporadis, konsorsium riset belum banyak terbentuk sehingga umumnya riset masih ego-sektoral dan berorientasi technology push (demand pull sedikit) serta belum kolaboratifnya dalam hubungan antar lembaga, dalam hal ini lembaga litbang, Indhan, universitas dan lembaga pembiayaan.

Karena itu jika dihadapkan pada karakteristik produk dan karakteristik Indhan yang membutuhkan teknologi tinggi, padat modal serta volume produksi yang sedikit maka banyak produk Industri Pertahanan tidak feasible dalam sudut pandang ekonomi/bisnis. Hal ini tentunya harus menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan (stake holders) baik Pemerintah, Pengguna maupun Industri Pertahanan itu sendiri dalam mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam.

Clustering Industri Pertahanan.

Sesuai UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, model pengembangan clustering Industri Pertahanan yang dikembangkan adalah Industri alat utama, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Industri komponen utama dan/atau penunjang, merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama alat peralatan pertahanan dan keamanan dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata. Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan. Industri bahan baku sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).

Masterplan Pembangunan Industri Pertahanan

Masterplan Industri Pertahanan sangat penting dalam mewujudkan terjadinya sinkronisasi dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam, terwujudnya kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri serta sekaligus mempercepat proses alih teknologi (transfer of technology) untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kandungan lokal melalui kerja sama produksi (joint production) yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri.

Strategi menuju kemandirian dapat dilihat dari Masterplan Pembangunan Industri Pertahanan tahun 2010-2029, yang mempunyai 2 target utama yaitu target alutsista dan target Industri Pertahanan. Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan bersifat sebagai pemukul yang dahsyat. Sedangkan target pencapaian Indhan adalah memenuhi pasar dalam negeri (jangka pendek), bersaing secara internasional dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

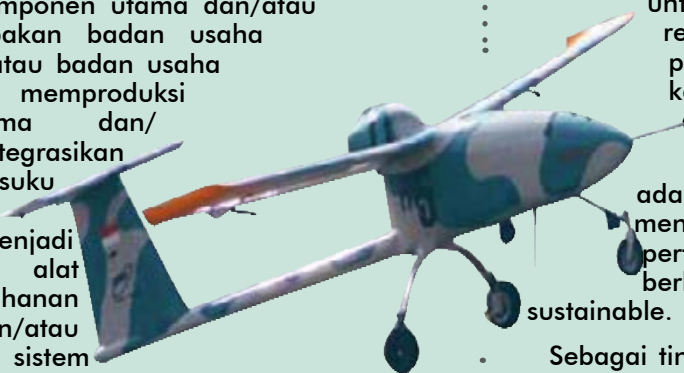
Tahapan master plan tersebut terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah kebijakan tahun 2010-2014 yang menitik beratkan pada penetapan program pembangunan kekuatan; stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan; penyiapan regulasi industri pertahanan; dan penyiapan new future products.

Tahap kedua adalah kebijakan tahun 2015-2019 yang menitikberatkan pada penetapan program untuk mendukung MEF; melanjutkan regulasi industri pertahanan; peningkatan kemampuan kerja sama produksi; dan melanjutkan penyiapan produk masa depan.

Tahap ketiga adalah kebijakan tahun 2020-2024, yang menitik beratkan pada penetapan program untuk mendukung postur ideal; melanjutkan regulasi industri pertahanan; peningkatan pertumbuhan industri; dan peningkatan kerja sama internasional (new product development advanced technology)

Sebagai tahap terakhir (tahap empat) adalah kebijakan tahun 2025-2029 yang menitik beratkan pada kemandirian industri pertahanan yang signifikan; kemampuan berkolaborasi; dan pengembangan yang sustainable.

Sebagai tindak lanjut dari Masterplan tersebut, telah disusun Cetak Biru Riset Alpalhankam yang diharapkan menjadi panduan dalam Litbang Alpalhankam ke depan. Di dalam Cetak Biru tersebut terdapat 23 produk riset Alpalhankam termasuk Almatasus Polri yang sudah ditentukan tahapan risetnya mulai dari tahap 1 penguasaan desain, tahap 2 penguasaan produksi dan tahap 3 pengembangan produk baru. Tahapan riset



Therefore, if faced with product characteristics and the characteristics of the defense industry that requires high technology, capital intensive and the small production volume, the Defense Industry products are not feasible in economic or business standpoint. It certainly should be a challenge for all stakeholders in this regard the Government, User and Defense Industries itself in realizing the fulfillment of the defense and security equipment independently.

Clustering Defense Industry.

In accordance with Act No.16 of 2012 on the Defense Industry, Defense Industry clustering development model that was developed is as follows: The main weapon industry, is a State Owned Enterprise established by the government as the main alloying (lead integrator) which produces main weapon system and / or integrate all the major components, components, and raw materials became the main weapon. The main components and / or support industry, is a state-owned enterprise and / or private companies that produce the major components and / or integrate the components or parts with raw materials becoming main component of defense and security equipment and / or main weapon system platform. Components and / or support (supplies) industry is a state-owned enterprise and / or private companies that produce parts for main weapon system, spare parts for the major components, and / or produce products supplies. Raw materials industry as referred to in Article 10 paragraph (1) letter d is the State-Owned Enterprises and Private Companies who produce the raw materials

security equipment, the establishment of the domestic defense industry capability and simultaneously accelerate the process of technology transfer for the development of infrastructure and increase local content production through cooperation (joint production), which in turn is expected to encourage domestic economy activity.

Strategy towards self-reliance can be seen from the Defense Industry Development Master Plan 2010-2029, which has two main targets, which are the main weaponry system and the Defense Industry. The main weaponry system target that will be achieved is the main weaponry system that has high mobility and is a powerful hitter. The achievement of the defense industry target, is to meet the domestic market (short-term); internationally competitive; and able to support economic growth.

Phases of the master plan is divided into 4 stages. The first stage is the policy of 2010-2014 which focuses on the determination of the power development program; stabilization and optimization of the defense industry; preparation of the defense industry regulation; and preparation of new futures products.

The second stage is the policy years 2015-2019 that focuses on establishing a program to support the MEF; continue regulation of the defense industry; an increase in the ability of production cooperation; and continue the preparation of future products.

The third stage is the policy years 2020-2024, which focuses on the establishment of programs to support the ideal posture; continued regulation of the defense industry; industry growth; and increased international cooperation (new product development advanced technology).

As the final stage (stage four) is a policy in 2025-2029 that focuses on the self-reliance of significant defense industry; ability to collaborate, and sustainable development.

As a follow up of the Master Plan, Blueprint for Research and development of defense equipment has been prepared, which is expected to be a guide in the future. Inside the Blueprint there are 23 research products including police's special material equipment, which its stages are already predetermined ranging from stage 1 mastery of design, stage 2 mastery of

production and stage 3 development of new product. Research stages are also aligned with technology level that will be mastered from prototype, to production / mass production, including the policies adopted in the research stage in the form of joint production or carry out joint research with the domestic and foreign defense industry.

that will be used by the main equipment industry, major and / or support component industry, and components and / or support (supplies) industry.

Defense Industry Development Master Plan

The Defense Industry Master plan is crucial in realizing the synchronization in meeting the needs of defense and



tersebut juga diselaraskan dengan peta level teknologi yang akan dikuasai dari sejak prototipe, sampai pada produksi/mass production, termasuk kebijakan yang ditempuh dalam tahapan riset baik berupa joint production ataupun melaksanakan joint riset dengan industri pertahanan dalam dan luar negeri.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dibentuk dengan mengemban tugas untuk mengatur kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kelembagaan (tiga pilar kelembagaan) yaitu Pemerintah, Pengguna dan Indhan.

Sebelum UU No. 16 Tahun 2012 terbit, KKIP telah dibentuk melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2010 dengan ketua Menhan, wakil ketua Menneq BUMN, dan anggota terdiri dari Menperin, Menristek, Panglima TNI dan Kapolri, dengan Wamenhan sebagai sekretaris. Dengan telah berlakunya UU No. 16 Tahun 2012 maka organisasi KKIP yang ada sekarang terjadi perubahan pada Ketua KKIP yaitu Presiden RI dan pada keanggotaan KKIP ada penambahan menteri sebagai anggota KKIP yaitu Mendikbud, Menkominfo, Menkeu, Menlu dan Menneq PPN/KaBappenas. Diharapkan dengan organisasi yang baru ini KKIP memiliki kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif serta menghilangkan hambatan koordinasi dalam rangka membangun kemampuan Industri Pertahanan yang lebih berdaya saing dan mandiri.

KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Indhan, diantaranya adalah Masterplan Industri Pertahanan dan berbagai kebijakan KKIP, dimana pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 program kerja KKIP dalam bidang kebijakan meliputi penetapan Program revitalisasi Industri Pertahanan, Stabilisasi dan optimalisasi Industri Pertahanan, Penyiapan regulasi Industri Pertahanan dan Penyiapan new future products. Target pencapaian sasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri (jangka pendek), bersaing secara internasional dan economic growth support.

Produk-produk kebijakan/regulasi strategis yang sudah dihasilkan oleh KKIP cukup banyak diantaranya adalah Kebijakan Dasar untuk Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/01/KKIP/I/2012), Verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMNIP (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/02/KKIP/I/2013), Kriteria industri pertahanan (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/03/KKIP/I/2012), Penguasaan teknologi pembangunan Kapal Selam (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/04/KKIP/III/2013), Keputusan tentang organisasi, tugas, dan tanggung jawab serta wewenang manajemen proyek Alutsista matra laut (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/05/KKIP/III/2013), Pembentukan tim manajemen proyek kerja sama pembangunan Kapal Selam dan Kapal Perusak Kawal Rudal (Keputusan Ketua KKIP Nomor : KEP/06/KKIP/III/2013). Produk kebijakan untuk penyiapan dan penguatan industri untuk produk masa depan

yaitu Industri kendaraan tempur, Industri kendaraan taktis, Industri kapal perang atas air & dan bawah air, Industri kapal-kapal pendukung, Industri pesawat militer sayap tetap & sayap putar, Industri senjata ringan untuk perorangan & kelompok/ satuan, Industri senjata berat, Industri propellant dan munisi (MKK & MKB), Industri Roket/MLRS dan Torpedo serta peluru kendali dan Industri peralatan Network centric operation system (C4sir).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2012 merupakan produk kebijakan strategis yang menjadi payung hukum dan pilar pembangunan yang terstruktur dalam pengaturan, pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan dari industri pertahanan.

Program Nasional Alpalhankam

Pada Sidang Pertama KKIP yang dipimpin Bapak Presiden tanggal 12 Maret 2014 telah disampaikan tujuh produk alpalhankam untuk dapat diproduksi didalam negeri melalui Program nasional. Dengan penetapan Program Nasional ini diharapkan dapat dilakukan integrasi penggunaan sumber daya antar kementerian terkait menuju sinergitas, sehingga bisa lebih fokus dalam mendukung keberhasilan Program Nasional yang sudah ditetapkan. Tujuh Program nasional tersebut adalah Pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, Pembangunan kapal selam, Pembangunan industri propellant, Pengembangan roket nasional, Pengembangan rudal nasional, Pengembangan radar nasional dan Pengembangan tank sedang.

Penutup.

Sebagai penutup tulisan ini beberapa hal mendasar yang menjadi pemahaman bersama oleh seluruh pihak terkait dalam pengembangan Industri Pertahanan, yaitu diperlukan sinergitas Antara Regulator/ Pemerintah, pengguna (Kementerian/ Lembaga /TNI /Polri) dan Indhan dalam mewujudkan Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif. Pembinaan Indhan membutuhkan peran seluruh stake holder secara lintas sektoral antar Kementerian dan Lembaga. Peran KKIP sangat strategis dalam mengintegrasikan, mensinergikan dan membangun hubungan lintas sektoral serta memutus hambatan birokratis antar Kementerian/ Lembaga dalam upaya menghasilkan kebijakan konstruktif dan implementatif dalam pembinaan Indhan.



Defense Industry Policy Committee

In accordance to Act No. 16 Year 2012 on the Defense Industry, Defense Industry Policy Committee (KKIP) was formed with the task to set up the authority, duties and responsibilities of each of the institutions (the three pillars of institutional) the Government, the User and the defense industry.

Prior to Act No. 16 published in 2012, KKIP has been established through Presidential Decree Number 42 of 2010 with Defense Minister as chairman, deputy chairman is the state minister of State-owned Enterprises, and members consisting of Minister of Industry, Minister of Technology, Armed Forces Commander and Chief of Police, with Deputy Defense Minister as secretary. With the enactment of Act No. 16 of 2012, Chairman of KKIP is the President and the additional members are Education Minister, Minister of Communication, Finance Minister, Foreign Minister and the state minister of national development planning / KaBappenas. It is expected that the new KKIP organization have policies that are more comprehensive and eliminate coordination barriers in order to establish the ability of the defense industry more competitive and self-sufficient.

KKIP has formulated a range of strategic national policy in the field of defense industry, including the master plan for Defense industry and KKIP policies, which in the period 2010 to 2014 work program in the field of policy includes the establishment of Defense Industry revitalization program, the Stabilization and optimization of Defense Industry, preparation of defense Industry regulation and preparation for new futures products. Target achievement of the goal is to meet the needs of defense and security equipment domestically (short-term), competing internationally and support economic growth.

revitalization of BUMNIP management (KKIP Decree No. KEP/02/KKIP/I/2013), the criteria of defense industry (KKIP Decree No. KEP/03/KKIP/I/2012), Mastery of submarine development technology (KKIP Decree No. KEP/04/KKIP/III/2013), the organization, duties, responsibilities, and authority of naval weapons systems project management (KKIP Decree No. KEP/05/KKIP/III/2013), establishment of the management project team of the development cooperation of submarine and Guided Missile Destroyer (Decree No. KEP/06/KKIP/III/2013). Policies to prepare and to strengthen the industry for future products ie combat vehicles, tactical vehicles, surface and under the water warships, support ships, military fixed-wing & rotary wing, small arms industry for individuals & group / unit, heavy weapons, ammunition & propellant Industry (MKK & MKB), Rocket Industries / MLRS and Torpedo as well as missiles and Network centric operation system (C4sir).

Act No. 16 of 2012 on the Defense Industry which approved on October 5th, 2012 is a strategic policy that becomes legal framework and structured development pillar in arrangement, institutional management and execution of the defense industry.

National Program for defense equipment

In the First KKIP assembly led by the President, dated March 12, 2014 has delivered seven defense equipment products to be manufactured within the country through the national program. With the establishment of the National Program is expected to do the integration of the use of resources among relevant ministries into synergy, so they can focus more on supporting the success of the National Program that has been set. Seven of the national programs are KF-X/IF-X fighter jets Development, submarines Development, propellant Industry Development, national rocket development, development of national missile, the national radar and Development of medium tanks.

Closing

In closing in this paper, some fundamental things that become a common understanding by all parties involved in the development of defense industry, namely: Required synergy between Regulator / Government, user (Ministry / Agency / military / police) and the defense industry in realizing the professional Defense Industry which effective, efficient, integrated, and innovative. Development of defense industry requires the roles of the entire stakeholders across sectors between the Ministries and Agencies. KKIP's role is very strategic in integrating, synergizing and building relationships across sectors and break the bureaucratic barriers between ministries / institutions in an effort to generate constructive and implementable policy in developing the defense industry.



Strategic policies that have been produced by KKIP quite a lot, among them are Basic Policy for Procurement of primary weapon system of TNI and Police's special material equipment (KKIP Decree No. KEP/01/KKIP/I/2012), Verification of the defense industry capability and the

Menyiapkan Industri Pertahanan yang Mumpuni

Oleh : H Kol. Caj Supama P Dikrama

Sebagai negara kepulauan (archipelago state), Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan batas-batas teritorial di laut yang juga panjang. Ribuan pulau yang tersebar, mensyaratkan fungsi pertahanan yang berjalan prima. Salah satu konsekuensinya, dibutuhkan kemampuan armada Angkatan Laut, terutama patroli pantai untuk menjaga dan patroli batas-batas wilayah laut.

Wilayah Indonesia yang stabil menjadi landasan bagi terselenggaranya pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya fungsi pertahanan negara wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa menjamin keselamatan bangsa merupakan hal yang fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.

Berdasarkan hasil analisis mengenai ancaman dalam jangka pendek dan menengah, kecil kemungkinan adanya invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia. Namun kondisi yang kondusif jangan sampai membuat kita abai membangun kekuatan

industri strategis dalam memproduksi kebutuhan militer domestik, membuat Indonesia harus selalu bergantung pada peralatan militer dari luar negeri. Memang tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan peralatan militernya sendiri, karenanya penguasaan teknologi baru kemiliteran merupakan simbol superioritas.

Kesiapan SDM dan Industri

Dalam rangka pembangunan industri pertahanan yang mumpuni, dibutuhkan dukungan SDM yang menguasai iptek, dan kompetensi pabrikan. Penguasaan iptek merupakan suatu keharusan, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan industri pertahanan, agar proses alih teknologi bisa berjalan mulus. Hingga saat ini ketergantungan Indonesia terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri memang masih tinggi, dan tengah diupayakan untuk dikurangi secara bertahap. Lembaga pendidikan kedinasan berbasis iptek, seperti Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Lembaga Pengkajian

pertahanan, termasuk mengembangkan industri pertahanan negeri sendiri. Penguatan industri pertahanan juga untuk mencegah terjadinya kesenjangan kapabilitas militer Indonesia, (khususnya) dengan negara-negara tetangga.

Pertahanan sangat bergantung pada teknologi militer, dan teknologi militer bukan hal yang murah. Keterbatasan dalam ilmu dan teknologi (iptek), serta kemampuan

Teknologi (Lemjiantek, di bawah Dinas Litbang TNI AD), akan banyak berperan dalam menyiapkan SDM yang andal di bidang iptek.

Kemampuan anak bangsa dalam industri pertahanan, memiliki perjalanan panjang, dan telah diakui pihak luar. Salah satu tonggakinya adalah apa yang dulu pernah dirintis oleh Wiweko Soepono dan Nurtanio. Di tengah keterbatasan sarana pendukung dan bahan baku di

Preparing Capable Defence Industry

Oleh : H Kol. Caj Supama P Dikrama

As an archipelagic country (archipelago state), Indonesia has a vast territory, also with long territorial sea boundaries. Thousands of islands are scattered, requiring excellent defense functions deployment. As one of the consequences, the Navy fleet capabilities are needed, especially for the coastal guard patrol and the sea borders patrol.

A steady Indonesian territory became the foundation for the implementation of national development for the welfare of the people. Therefore the function of national defense must maintain and protect the country's sovereignty, territorial integrity of the Republic of Indonesia, and the safety of the people from all forms of threats. As mandated by the Act No. 3 of 2002 on National Defence that guarantees the safety of the people which is fundamental

implementation of the national defence functions.

Based on short to medium term threat analysis, there is a small possibility of invasion or military aggression against the Indonesian by other countries. However, favorable conditions should not make us neglectful to build the strength of the defense, including our own indigenous defense industry development. Strengthening the defense industry as well as to prevent the capability gap

occurrence of Indonesian military, (especially) with the neighboring countries.

Defense relies heavily on military technology and military technology not something inexpensive. The limitations in science and technology (science), as well as the strategic industry capability in producing domestic military needs, made Indonesia shall always rely on military equipment from abroad. Indeed there is no single country capable fulfill the needs of its own military equipment, hence the mastery of new military technology is a symbol of superiority.

Human Resources and Industry Readiness

In order to build a capable defense industry, human resource support needed to master science and technology, and manufacturing competencies. Mastery of science and technology is a must, which is the key to successful development of the defense industry, so that technology transfer process can run smoothly. Until now, Indonesia's dependence on foreign defense technology is still high, and are being sought to be reduced gradually. Science and technology-based service educational institutions, such as the Naval Technology College (STTAL), Institute for Technology Assessment (Lemjiantek, under the Army Research the Department), will play a part in the preparation of reliable human resources in the field of science and technology.

The ability of the nation in the defense industry, has a long journey, and has been recognized by outsiders. One of them was what had once pioneered by Wiweko Soepono and Nurtanio. In the midst of supporting facilities and raw materials during the War of Independence, they established the Bureau of Planning and Construction in Maospati Air Base (now known as Iswahjudi), Madiun.

Wiweko Soepono and Nurtanio in the middle of all the limitations, is capable of producing an airplane (experimental) with the name of WEL 1-RI-X. WEL is the acronym of "Wiweko Experimental Light plane", the power used engine from Harley Davidson motorcycles.

The plane was successfully flown by test pilots Suhada for a few minutes in space Yogyakarta, in the presence of President Soekarno. Then Wiweko and Soepono also made

glide plane (glider) made from plywood, with the name Shucks. As it was known Nurtanio continuing efforts to develop the defense industry (especially aerospace) up to sacrificing his life. In March 1966, Nurtanio killed during his flying test. As a tribute, his name was perpetuated in the national aviation industry, namely Lipnur (Institute Nurtanio Aviation Industry), the predecessor agency PT IPTN (Nusantara Aircraft Industry), which is now known as PT Indonesian Aerospace (DI).







masa Perang Kemerdekaan, keduanya mendirikan Biro Rencana dan Konstruksi di Pangkalan Udara Maospati (sekarang dikenal Iswahjudi), Madiun.

Wiweko Soepono dan Nurtanio di tengah segala keterbatasan, sanggup memproduksi pesawat terbang (eksperimental) dengan nama WEL 1-RI-X. WEL adalah akronim dari "Wiweko Experimental Light plane", yang tenaganya berasal mesin bekas sepeda motor Harley Davidson. Pesawat tersebut berhasil diterbangkan oleh penerbang uji Suhada selama beberapa menit di angkasa Yogyakarta, dengan disaksikan Presiden Soekarno. Lalu Wiweko dan Soepono juga membuat pesawat luncur (glider) berbahan kayu triplek, dengan nama Kampret. Sebagaimana diketahui Nurtanio terus melanjutkan upaya pengembangan industri pertahanan (khususnya dirgantara), hingga sampai mengorbankan nyawanya. Pada Maret 1966, Nurtanio gugur saat sedang melakukan uji terbang. Sebagai penghormatan, namanya sempat diabadikan dalam industri penerbangan nasional, yaitu Lipnur (Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio), lembaga pendahulu PT IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia (DI).

Kemudian di awal 1960-an, anak bangsa kembali menunjukkan kemampuannya, ketika mereka mampu mendirikan galangan kapal secara cepat di Surabaya. Galangan itu untuk menyongsong kedatangan 12 unit kapal selam kelas "Whiskey" dari Rusia. Anggota TNI AL mampu melakukan perbaikan dan perawatan berkala

pada alutsista yang tergolong baru dan canggih di masa itu. Galangan kapal untuk kapal selam ini kemudian hari digabung dengan PT PAL.

Dalam perjalanan waktu, kemampuan SDM dan pabrikan terus berkembang. Ini terlihat ketika Pemerintah pada Desember 2007, melalui Wapres (saat itu) Jusuf Kalla, melakukan pemesanan 150 unit panser Anoa pada PT Pindad. Panser produksi Pindad ini disebut setara dengan panser VAB, buatan Perancis, yang digunakan Pasukan Garuda saat bertugas di Lebanon. Pesanan itu sebenarnya untuk jangka waktu produksi dua tahun, tetapi Pindad menyanggupi "tantangan" Wapres, bahwa dalam jangka waktu satu tahun, pesanan telah siap, dengan tenggat waktu Hari TNI 5 Oktober 2008.

Pembelian panser produksi Pindad, maupun alutsista lainnya, menunjukkan tekad untuk lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan produk pertahanan. Pemerintah (melalui Dephan) juga menunjukkan kehendak politik untuk membatasi impor senjata, dan sebagai gantinya akan diisi oleh produksi BUMN Strategis (yang kini juga mendapat sebutan BUMN Industri Pertahanan), yakni PT PAL, PT DI, PT Pindad, PT Krakatau Steel dan PT LEN Industri. Kepercayaan pada produk nasional merupakan momentum, namun pada sisi lain juga menuntut komitmen kuat dari para pengelola industri strategis. Dengan cara menghasilkan produk yang kualitasnya dapat diandalkan, seperti panser (Pindad) dan korvet (PT PAL), yang sudah ada perbandingannya, yakni produk luar negeri yang sudah kita miliki sebelumnya.

Dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, UU tersebut menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan penyediaan bahan baku. Pasar dalam negeri saja, akan mampu menyerap industri pertahanan Indonesia. Dengan dukungan penuh pemerintah, produk-produk alutsista buatan dalam negeri akan semakin diminati oleh negara-negara lain. Beberapa negara yang telah menyatakan minat pada alutsista buatan Indonesia antara lain Timor Leste dan Filipina, Malaysia dan Korea Selatan. Misal, Malaysia belum lama ini membeli 32 panser Anoa buatan PT Pindad. Sementara, Korea Selatan membeli 8 pesawat CN 235 buatan PT Dirgantara Indonesia.

Hal penting lainnya dari terbitnya UU Industri Pertahanan, ialah dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bisa mempengaruhi kebijakan pengadaan alutsista. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21, KKIP menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Kemudian Pasal 8 juga mengatur, pengguna (dalam hal ini TNI, Polri, Kementerian atau institusi lain) wajib menggunakan alat pertahanan dan keamanan buatan dalam negeri.

Kehadiran KKIP itu kini memiliki relevansi yang tinggi, terkait dengan komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi industri dalam negeri. Dengan menggunakan alutsista produksi dalam negeri, langkah ini dapat memacu perkembangan industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi.



Sumber : www.jakartagreater.com

Then in the early 1960s, the nation again demonstrated its ability, when they capable quickly set up a shipyard in Surabaya. The shipyard to commemorate the arrival of 12 units of class submarines "Whiskey" from Russia. Members of the Navy capable perform repairs and periodic maintenance on defense equipment is relatively new and sophisticated in the future. Shipyard for submarines later merged with PT PAL.

In the course of time, human resources and manufacturing capabilities continue to evolve. This is seen when the Government in December 2007, through the Vice President (at that time) Jusuf Kalla, place an order of 150 units of APCs Anoa on Pindad. Panzer PINDAD production is called the equivalent of VAB armored vehicles, made in France, which is used Garuda troops while serving in Lebanon. That orders for actual production of two years period, but PINDAD undertakes the "challenge" of The Vice President, that within a period of one year the order has been completed by the military's Day deadline October 5, 2008.

The purchase of PINDAD panzers production, as well as other weapon system, showed our determination to be self-sufficient in meeting the needs of defense products. The Government (through the Ministry of Defense) also demonstrated the political will to restrict the import of weapons, and will instead be filled by the production of strategic SOEs (which is now also got called Defense Industrial SOEs), PT PAL, PT DI, PT Pindad, PT Krakatau Steel and PT LEN industry. Confidence in the national product is the momentum, but on the other hand also requires a strong commitment from the managers of strategic industries. By producing quality products that are reliable such as APCs (PINDAD) and Corvette (PT PAL), in comparison with the existing namely foreign products we already have before.

With the enactment of Law No. 16 Year 2012 on the Defence Industry, the Law as the legal reference for the development and the supply of raw materials for domestic defense industry. In domestic market alone will be able to absorb Indonesian defense industry. With the full support of the government, weapon system products made in the country will be increasingly in demand by other countries. Several countries have expressed interest in Indonesia made in weapon system among others, East Timor and the Philippines, Malaysia and South Korea. Eg, Malaysia has recently purchased 32 PT Pindad APCs Anoa. Meanwhile, South Korea purchased eight CN-235 aircraft made by PT Indonesian Aerospace.

Other highlights of the enactment of Law Defense Industries, is the establishment of Defense Industry Policy Committee (KKIP) that could affect procurement policy. As stipulated in Article 21, KKIP establish policies meet the needs of defense and security equipment tool. Then Article 8 also set, the user (in this case the military, police, the Ministry or other institution) must use domestic (indigenous) made defense and security equipment and tools.

The presence KKIP it now has a high relevance , associated with the Government 's commitment to prioritize the procurement of weapons systems (defense equipment) production of the domestic industry. By using the indigenous production of defense equipment, this step can spur industrial development, expand employment opportunities, and improve the mastery of technology.

Defense Industry Law also regulates the procurement of raw materials, in particular in Article 14, that the raw materials industry is state-owned companies, such as PT Krakatau Steel, which manufactures steel and other metal materials that will be used for the major appliance

UU Industri Pertahanan juga mengatur soal pengadaan bahan baku, khususnya dalam Pasal 14, bahwa industri bahan baku merupakan BUMN, seperti PT Krakatau Steel, yang memproduksi baja dan material logam lainnya yang akan digunakan untuk industri alat utama, industri komponen utama atau penunjang. Kesiapan bahan baku juga ditunjukkan PT LEN Industri, yang pada saat ini menjadi pemasok utama sistem radar nasional. Menurut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, LEN memiliki peran strategis memenuhi kebutuhan sistem radar nasional, spesifikasi teknis tidak dapat didikte negara lain, suku cadang yang mudah dan murah, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Merujuk arahan Presiden RI tanggal 26 Oktober 2011 di PT. DI dalam rangka pemenuhan MEF (Minimum Essential Force) dan modernisasi alutsista TNI/almatsus Polri ditetapkan sebagai Pedoman Kebijakan Dasar dalam Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Apabila alutsista bisa diproduksi di dalam negeri, oleh industri pertahanan kita, maka para pengguna wajib untuk membelinya.

Skema Anggaran

Pemanfaatan produk nasional juga merupakan langkah penghematan. Sekadar ilustrasi, panzer ringan seperti Anoa (sekelas VAB), harga per unitnya berkisar Rp 5 hingga 8 miliar bila dilengkapi dengan senjata. Sementara panzer buatan luar negeri, kisaran Rp 10 miliar per unitnya, jadi masih tetap ada penghematan sekian persen. Dalam beberapa kasus pembiayaan produksi diambil dari APBN. Seperti dalam order produksi panzer Pindad di atas, biaya produksi akan ditalang Bank BNI, Bank Mandiri, dan BRI dengan jaminan Kementerian Keuangan. Skema ini sama dengan skema anggaran melalui kredit ekspor yang diterapkan untuk pengadaan alutsista selama ini.

Berdasarkan pengalaman sepuluh tahun terakhir, terhitung sejak pengadaan jet tempur Sukhoi (2003), di mana alokasi anggaran pengadaan alutsista dalam APBN, jauh dari realitas kebutuhan yang ada. Pengadaan alutsista selalu kalah dengan sektor lain, seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan, yang lebih diprioritaskan karena berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat banyak. Kemenhan dan Mabes TNI kemudian melakukan langkah terobosan, yaitu sistem imbal beli, untuk pengadaan alutsista.

Pembelian alutsista dengan dengan imbal beli, yang kurang lebih sama maksudnya dengan kredit ekspor, dianggap lebih menguntungkan karena tidak membebani devisa negara. Memang satu hal yang diharapkan oleh industri strategis adalah regulasi pemerintah dalam skema pinjaman domestik untuk membiayai produksi pesanan. Ketidakpastian anggaran akan berakibat pada tersendatnya produksi, seperti pada pengalaman pengadaan panzer Anoa di atas.

Karena adanya pemotongan anggaran tahun 2008, pesanan yang sebelumnya berjumlah 150 unit, diturunkan menjadi 40 unit saja. Turunnya jumlah pesanan panzer

Anoa ini bisa menggambarkan kompleksitas industri pertahanan dalam negeri. Sejumlah komponen panzer Anoa masih didatangkan dari beberapa industri kendaraan dan peralatan militer dunia. Pembelian sebagian komponen panzer masih menggunakan euro dan dollar AS. Di tengah nilai tukar rupiah yang acapkali merosot, pada gilirannya berimbas pada biaya produksi panzer dan alutsista lainnya, yang juga ikut meningkat.

Sebagaimana pernah dikatakan Dirjen Sarana Pertahanan (saat itu) Marsda TNI Eris Herryanto pada sebuah pertemuan antara Kemenhan dan pimpinan BUMN Industri Strategis, bahwa dibutuhkan jaminan ketersediaan anggaran, agar TNI dapat memenuhi alutsistanya sesuai rencana strategis lima tahunan tanpa mengubah skala prioritasnya. "Selama ini ketersediaan anggaran acapkali berubah-ubah, sehingga mempengaruhi rencana pengadaan alutsista TNI," ujar Eris Herryanto.



¹Riefqi Muna, "Dinamika Konsep Pertahanan Era Reformasi" dalam Prisma (Januari 2010), hal.23.

²Lilik Hendrajaya, "Menyiapkan TNI yang Profesional dan Dedikatif dari Perspektif Ilpengtek", dalam Patriot (Oktober 2006).

³JMV Soeparno dan Dudi Sudibyo, Dari Blitar ke Kelas Dunia: Wiweko Soepono Membangun Penerbangan Indonesia (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 2002), hal.68-70.

⁴Atmadji Sumarkidjo, Mission Accomplished: Misi Pendaratan Pasukan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandra (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2010), hal.32.

⁵Kompas, 14 Desember 2008.

⁶Profil singkat BUMN Industri Pertahanan, beserta produk unggulannya, bisa dibaca dalam Buku Tahunan Kemenhan 2008, hal 147-201.

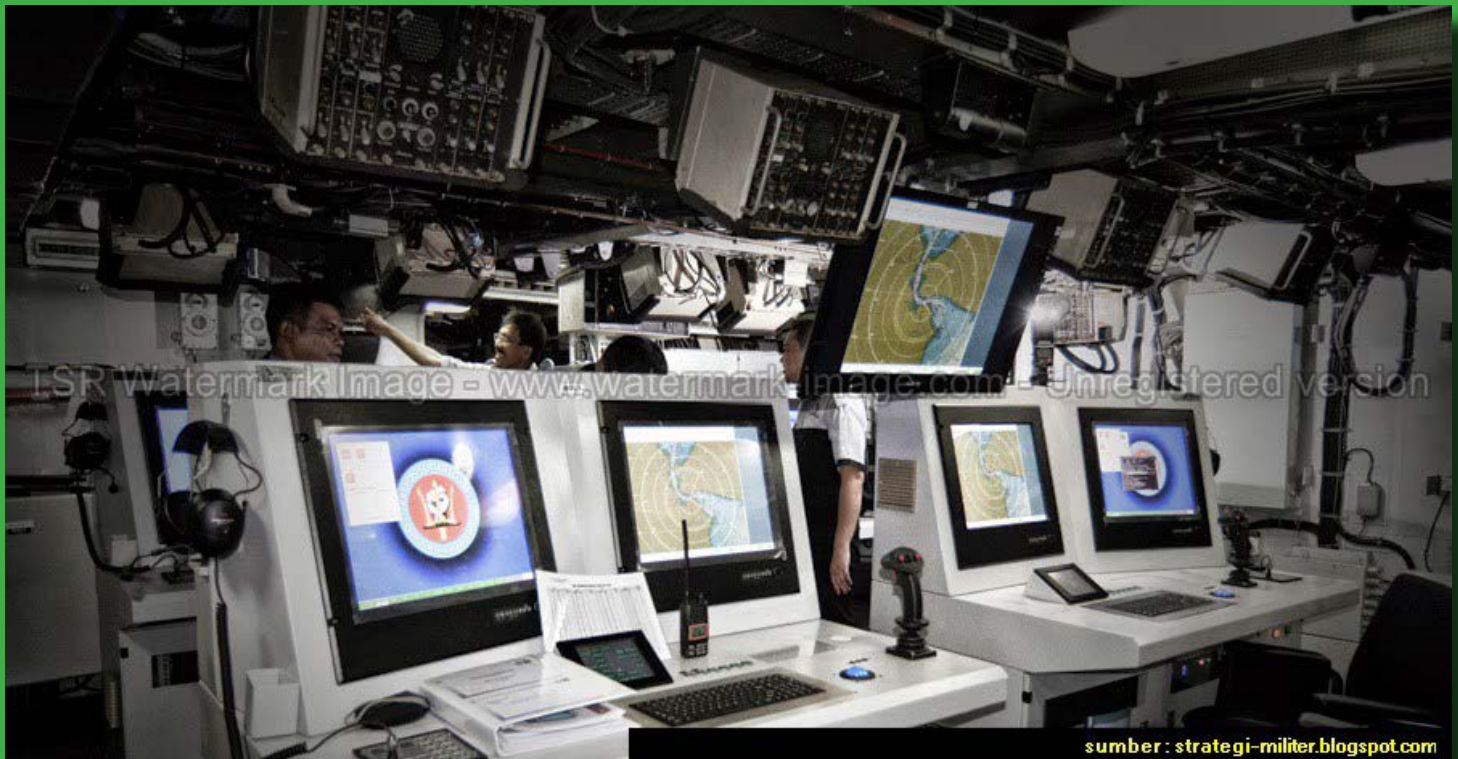
⁷Republika, 26 Maret 2014.

⁸www.setkab.go.id "Menuju Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri" (diakses 16 Maret 2014).

⁹Kompas, 4 September 2003

¹⁰Kompas, 23 Februari 2009

¹¹Defender, Edisi 37, November 2008, hal.65.



industry, the main or auxiliary component industry. The raw materials was also demonstrated readiness by PT LEN Industry which at this time became a major supplier of radar systems nationwide. According Vice Defense Minister Sjafrie Syamsuddin, LEN has a strategic role to meet the needs of national radar system, the technical specifications could not be dictated by other nations, spare parts are easy and cheap and always keep up with updated technology.

Referring to directives the President of Indonesia dated October 26, 2011 in PT. DI in order to fulfill MEF (Minimum Essential Force) and modernization of TNI weapon system / Police specialized equipment was determined as the Basic Manual for Military Weapon System and Police Specialized Equipment Procurement Policy. If the weapon system can be produced domestically by our defense industry, then the users are compulsory to buy it.

Budget scheme

Utilization of the national product is also support austerity measures. Just for illustration, light APCs such as Anoa (class VAB), the price per unit ranging from U.S. \$ 5 to 8 billion when equipped with a weapon. While foreign-made APCs, the price range of USD 10 billion per unit, so there is still a percentage of savings. In some cases the production is taken from the state budget financing. As in PINDAD armored production orders, production costs will be bailed out Bank BNI, Bank Mandiri, BRI and guarantees the Ministry of Finance. This scheme is the same as an export credit finance schemes through which applied for during this procurement.

Based on the experience of the last ten years, starting from the procurement of Sukhoi fighter jets (2003), in which the allocation of defense procurement budget in the state budget, is far from the reality of the needs that

exist. Defense procurement is always inferior to other sectors, such as education and health sector, which is prioritized as a direct impact on the welfare of the people. MoD and TNI headquarters have to make breakthrough for the purchase yield procurement system.

Purchase of defense equipment with the purchase yield, which is roughly equal to the mean of export credits, are considered more advantageous because it does not burden the country's foreign exchange. It is one thing to expect is a strategic industry regulation by the government in the domestic loan scheme to finance the production order. Uncertainty budget will result in production delays, such as the procurement of APCs experience Anoa mentioned above.

Due to budget cuts in 2008, previous orders totaled 150 units, was lowered to 40 units only. The fall in the number of orders the Panzers Anoa can illustrate the complexity of the domestic defense industry. A number of Anoa Panzers components are still imported from some world vehicles industrial and military equipment. Most purchase of panzers components still use the euro and the U.S. dollar. In the middle of the exchange rate are often degenerate, in turn the impact on APCs and other weapon system production costs also increased.

As been said Director General of Defense Facilities (at that time) Air Marshal Eris Herryanto at the meeting between the Ministry of Defense and Strategic Industries SOE leaders, that guarantees the availability of the budget required, so that the military can meet weapon system corresponding five-year strategic plan without changing priorities. "During this budget availability often change, thus affecting the military procurement plans," said Eris Herryanto.

PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA

Oleh : Deden Deni D, SE

Kasubbid Penyiapan Opini bidang opini Puskom Publik

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis. Meskipun begitu, Indonesia belum didukung oleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai, padahal alutsista merupakan faktor yang penting sebagai pertahanan negara. Untuk mendukung pertahanan negara tentunya dibutuhkan teknologi pertahanan yang selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan ataupun ancaman yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan akan selalu menjadi state of the art dan merupakan pioneer bagi aplikasi teknologi lainnya. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global.

Pembangunan pertahanan negara menggunakan konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (capability-based defence) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Untuk peningkatan kemampuan alutsista TNI dilaksanakan melalui pemeliharaan, repowering/retrofitting alutsista dan pengadaan

Alutsista baru sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, pemenuhan kebutuhan alutsista Kemhan/TNI diupayakan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah ini merupakan upaya dalam meminimalkan ketergantungan alutsista TNI dari produk luar negeri yang rawan terhadap embargo.

Pengembangan Industri Pertahanan

Kemampuan industri pertahanan Indonesia secara bertahap telah mengalami perkembangan yang relatif signifikan. Setidaknya untuk sejumlah alutsista tertentu, industri pertahanan nasional telah mampu memenuhi kebutuhan TNI. Industri pertahanan Indonesia sendiri di tingkat Asia Tenggara dapat dikatakan termasuk paling maju dan berpotensi sangat besar di masa depan. Sebagai gambaran, sejumlah BUMN seperti PT. PINDAD telah mampu membuat berbagai varian senapan serbu. Setelah sebelumnya pada generasi pertama senapan serbu SS-1 merupakan produk lisensi dari FN Belgia, senapan serbu generasi kedua SS-2 kini mulai digunakan sebagai senjata organik satuan-satuan TNI. Produk andalan dari PT. Pindad yang lain adalah panser 6X6 Anoa yang juga diminati oleh banyak negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Di industri dirgantara, PT. DI relatif berada di posisi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah pesawat varian CN-235 telah digunakan oleh TNI AL dan TNI AU. Pesawat ini juga menjadi salah satu produk unggulan PT. DI dan diekspor ke sejumlah negara sahabat. Korea Selatan tercatat sebagai pembeli terbesar pesawat ini mulai dari varian angkut untuk operasi khusus, patroli maritim, versi peringatan dini/pertahanan anti-rudal hingga digunakan oleh satuan penjaga pantai Korea Selatan. Untuk keperluan TNI AL, PT. PAL telah mampu membuat kapal patrol cepat FPB-57, Landing Platform Dock dan lain-lain. Kemampuan industri pertahanan non-BUMN juga semakin layak diperhitungkan. PT Malindo Marine Shipyard antara lain telah berhasil membuat Kapal Cepat Rudal 44 meter untuk TNI AL. Selain itu, kerja sama dengan industri pertahanan negara-negara sahabat terus dikedepankan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Ke depan industri pertahanan nasional baik BUMN maupun non-BUMN akan menjadi salah satu prioritas utama bagi kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Pemberdayaan industri pertahanan nasional menjadi perhatian baik khususnya dalam konteks upaya mencapai MEF. Dalam hal ini secara simultan kita berupaya mencapai suatu bentuk kemandirian industri



Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sesuai Perpres RI Nomor 42 Tahun 2010. Tugas KKIP adalah merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi kebijakan nasional bersifat strategis di bidang industri pertahanan, dan mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka mengembangkan industri pertahanan. Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimal (Minimum Essential Force/MEF) telah diprioritaskan pada pembangunan komponen utama melalui pembangunan sistem, personel, fasilitas dan materiel melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Sementara itu pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.



based defence concept) while considering the threats faced and the development trend of the strategic environment. For improvement of military weapon systems capabilities implemented through maintenance, repowering / Retrofitting of weapon systems and procurement. The new weapon systems in accordance with the urgent need to replace the weapon systems that have been unsuitable. As the government's commitment to increase the independence of the

national defence industry, weapon systems fulfillment Ministry of Defence / TNI attempted utilizing the maximum capability of national defence industry. This step is an effort to minimize dependence of military weapon systems from overseas products which vulnerable to an embargo.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN SUPPORT OF STATE DEFENCE

Indonesia is the largest archipelago in the world that lies in a strategic position. Even so, Indonesia has not been supported by adequate main weapons systems (weapon systems), whereas weapons systems is an important factor for the country's defence. To support the national defence certainly needed defence technology that has always been considered to represent the present as always driven by the ability to prevent or to be able to answer the demands of the ever-changing threats. Therefore, defence products will always be a state of the art and is a pioneer for other technological applications. In this context, a country that has an established defence industry is considered to have a strategic advantage in the global order.

In order to empower the domestic defence industry, the government has established a Defence Industry Policy Committee (KKIP) in accordance with the Presidential Regulation No.42 Year 2010. KKIP task is to formulate, coordinate, control, monitor, evaluate national policies are strategic in the defence industry, and coordinate cooperation abroad in order to develop the defence industry. Development policy towards the country's defence force minimum essential (the Minimum Essential Force / MEF) has prioritized the construction of the main components through system development, personnel, facilities and materiel through the modernization of the main tools of weapon systems (weapon systems). The development of reserve components and supporting components defence gradually implemented in accordance with the capabilities of available resources.

Development of the country's defence capability uses the based defence budget-concept (capability-

Defence Industry Development

The ability of Indonesia's defence industry has been gradually progressing relatively significant. At least for a certain number of weapon systems, national defence industry has been able to meet the needs of the military. Indonesia's indigeneous defence industry in South East Asia can be said to be among the most advanced and potentially very large in the future. As an illustration, a number of state-owned companies such as PT. PINDAD have been able to create different variants of assault rifles. After the first generation SS-1 assault rifle which is a licensed product of FN Belgium, second -generation assault rifle SS-2 are now beginning to be used as a weapon organic for TNI units. Mainstay products of PT. PINDAD another 6X6 APCs Anoa is also preferred by many countries such as Malaysia and the United Arab Emirates. In the aerospace industry, PT. DI relatively is in the leading position in Southeast Asia. A number of variants of the CN-235 aircraft have been used by the Navy and Air Force. The aircraft is also one of the flagship products of PT. DI and exported to a number of friendly countries. South Korea recorded as the largest buyer of aircraft ranging from transport variant for special operations, maritime patrol, version early warning / anti-missile defence to be used by the South Korean coast guard. For the purposes of the Navy, PT. PAL has been able to make the fast patrol boats FPB-57, Landing Platform Dock and others. Defence industrial capabilities of non-stateowned enterprises are also increasingly viable counts. PT Malindo Marine Shipyard, among others, had managed to create a 44-meter Fast Ship Missile for the Navy. In addition,

pertahanan dan pemenuhan kebutuhan TNI. Kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak karena dampaknya akan sangat positif bagi masa depan industri strategis Indonesia.

Kemandirian Industri Pertahanan

Berdasarkan amanat kebijakan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Kemandirian Industri Pertahanan dan Industri Alutsista dalam negeri, proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dengan mengutamakan pengadaan yang berasal dari industri dalam negeri. Dengan tujuan, untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Secara umum industri pertahanan dalam negeri sudah bisa memenuhi kebutuhan regular bagi TNI. Namun untuk skala besar, masih terkendala dengan sumber pendanaan, infrastruktur maupun SDM dalam pelaksanaannya. Untuk itu, proses pengadaan industri pertahanan dalam negeri tidak langsung melalui tuntutan mutu/kualitas dan penguasaan teknologi yang tinggi. Tetapi lebih kepada pentahapan kualitas dan teknologi yang dapat diperoleh secara trial and error melalui masukan dari pengguna akhir/TNI.

Kemhan sudah membuat Road Map Industri Pertahanan yang memetakan tahapan pemenuhan kebutuhan alutsista yang mampu diproduksi industri pertahanan. Untuk pengembangan industri pertahanan, selain menggunakan anggaran APBN, pembiayaan pengadaan barang/jasa militer juga didukung melalui anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang sudah diatur melalui peraturan khusus berupa Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Dengan kemandirian industri pertahanan maka keuntungan yang didapat adalah embargo terhadap peralatan militer dari luar negeri dapat dihindari dan keuntungan lainnya adalah TNI dapat memberikan deterrent effect (efek penggentar/penangkalan) yang efektif

bagi pihak lain/Negara lain. Ke depan industri pertahanan dalam negeri diharapkan dapat mendukung dan menjadi pilar perekonomian nasional. Selain itu, dengan adanya Perpres Nomor 42 Tahun 2010 dilanjutkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2012, dimana tujuannya adalah untuk memajukan industri pertahanan di Indonesia. Geliat industri pertahanan dalam negeri mulai terlihat bukan hanya panser Anoa saja, tetapi juga produk-produk lainnya yang akan menjadi produk nasional Indonesia. Kemudian bukan hanya menjadi tuan rumah tetapi juga bisa menjadi komoditi ekspor dari produksi pertahanan. Hal ini sangat memungkinkan mengingat, misalnya belanja pertahanan Negara-negara ASEAN sebesar USD 85 Miliar/tahun, tentunya merupakan peluang pasar yang besar bagi industri pertahanan nasional.

Industri Pertahanan merupakan salah satu unsur komponen pendukung pertahanan negara. Dalam upaya kemandirian industri pertahanan, pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan telah mampu memberikan daya tangkal (efek deterrent) dan kekuatan pertahanan yang handal, antara lain terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam (inward looking) maupun dari luar (outward looking). Terciptanya kemampuan pertahanan tidak terlepas dari kemampuan dalam penyediaan alutsista secara mandiri.

Kemandirian dapat tercipta bila industri dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan alutsista, sehingga tidak tergantung dari luar negeri dan tidak rentan terhadap embargo ataupun restriksi dari luar. Sedangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat terpenuhi bergantung pada komitmen pemerintah yang didukung seluruh stakeholder, produsen dan user, untuk bersinergi mewujudkan pemenuhan sarana pertahanan dan keamanan secara mandiri.



militerindonesiamy.blogspot.com

the defence industry cooperation with friendly countries continues to put forward to improve the ability of the domestic defence industry.

In the future national defence industry both SOEs and non-SOEs will be one of the main priorities for TNI forces policy development. Empowerment of the national defence industry become the attention, especially in the context of efforts to better achieve MEF. In this case we seek to simultaneously achieve a form of self-reliance and the defence industry meeting the needs of the TNI. This policy needs to be supported by all parties because the impact will be very positive for the future of Indonesia's strategic industries.

Defence Industry Self-reliance

Based on the policy mandate of Presidential Decree 54 of 2010 on Independence and weapon systems defence industry domestic procurement process conducted by the Ministry of Defence that is to prioritize procurement from domestic industry. With the aim to improve the alignment of the national industry and grow the creative industries, innovation, and independence of the nation, that is by giving priority to the use of strategic industries in the country. In general, the domestic defence industry has been able to meet the requirements for the regular military. However for large -scale production, still constrained by funding source, in the implementation of infrastructure and human resources. To that end, the procurement process of the domestic defence industry indirectly through the demands of quality / quality and high-tech mastery. But more to the phasing quality and technology that can be acquired through trial and error input from the end user TNI.

Ministry of Defence had already made a Road Map that maps Defence Industry phases which are capable of meeting the needs of weapon systems manufactured by defence industry. For the development of the defence industry, in addition to using the state budget, financing the procurement of goods / services are also supported through the military budget Domestic Loans (NOP) which is set up through a special regulation in the form of Government Regulation (PP) 54 Year 2008 on Procedures for Procurement and Forwarding Domestic Loans by the Government

With the self-reliance of defence industry the advantage gained is that embargo against weapon systems from

abroad can be avoided, and the other advantage is that TNI could provide effective deterrent effect for other parties / other countries. In the future domestic defence industry is expected to support and become a pillar of the national economy. In addition, the existence of Regulation Number 42 in 2010 continued with law number 16 of 2012, where the goal is to advance the defence industry within Indonesia. Stretching the domestic defence industry is starting to look not only on Panzers Anoa alone, but also other products that will become the Indonesian national product. Then not only for the host but could also be a commodity export of defence production. It is very possible considering, for example, defence spending ASEAN countries amounted to USD 85 billion / year, of course, is a huge market opportunity for the national defence industry.

The defence industry is one of the elements of the components supporting the defence of the country. In the defence industry, self-reliance efforts for the fulfillment of the defence facility needs has been able to give its deterrence (deterent effect) and a reliable defence force, among others, against potential threats, challenges, obstacles and distractions that come from within (inward looking) or from outside (outward looking). The creation of the defence capability correlated with the ability in providing the weapon systems independently.

Self-reliance can be achieved when the domestic industry is capable of supplying the needs of weapon systems, so it does not depend from abroad and are not vulnerable to embargo or restriction from the foreign countries. While the needs of Defense and homeland security can be fulfilled depends on the commitment of Governments that supported the whole stakeholders, producers and users, to synergize embodies the fulfilment of the security and defense facility independently.





Indonesia Mencanangkan "ZERO NARKOBA"

Oleh/by :Mutiarasilaen, S. Ikom
Pengadministrasi bid. KermainfoPuskomPublik

Narkoba adalah salah satu dari tiga kasus kriminal terbesar dan paling merugikan di Indonesia selain teroris medan korupsi. Bisnis ini juga termasuk dalam kategori black market business, yaitu bisnis yang mempunyai potensi mendatangkan keuntungan besar dan dalam tempo relative singkat, seperti juga bisnis senjata atau amunisi dan bisnis perjudian. Masing-masing dari tiga jenis bisnis tersebut biasanya saling terkait. Karena itu, penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan dan dikendalikan oleh organized crime, yaitu kelompok (biasa disebut sindikat, mafia, kartel) yang sudah mapan secara organisasi, struktur dan pendanaan.

Narkoba merupakan persaingan antar negara secara global, karena perang pada saat ini bukan lagi perang senjata, melainkan perang mental untuk menguasai sumber daya Negara tertentu. Secara tidak langsung peredaran narkoba itu akan memberikan keuntungan bagi Negara kuat untuk menjajah dan melemahkan sumber daya di negara lain. Menurut data WHO pematat narkoba di dunia sudah mencapai 190 juta orang.

Sementara pengguna narkoba (end user) di Indonesia yang cenderung mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun berjumlah 3,8 juta pada tahun 2010.

Dikutip dari data BNN, diperkirakan prevalensi (angka kejadian) penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan mencapai sekitar 5,1 juta orang di 2015. Apabila trend peningkatannya konsisten, angka perkiraan tahun 2015 dapat bertambah sampai dua kali lipat menjadi sekitar 10 juta orang dan yang cukup mengkhawatirkan adalah besarnya jumlah pengguna narkoba berasal dari kalangan siswa atau pelajar.

Saat ini Indonesia dihadapkan pada fase kehilangan generasi atau loss generation, dimana Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba. Para kawula muda seharusnya memanfaatkan usia produktifnya pada hal-hal yang positif, karena merekalah penentu dalam kemajuan suatu bangsa. Jika generasi muda suatu bangsa sudah dikuasai dan dirusak mentalnya oleh narkoba maka Negara tersebut tentu akan mudah dijajah. Narkoba adalah musuh yang penanganannya memerlukan perhatian yang khusus dan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintahan sampai dengan keluarga.

Program Zero Narkoba

Ancaman kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman keselamatan bangsa yang penanganannya memerlukan kerjasama secara terpadu yang melibatkan semua

Drugs are one of the three largest and most criminal cases prejudicial in Indonesia other than terrorism and corruption. These businesses are also included in the black market business, namely business that has the potential to bring huge profits and within relatively short, as well as a weapon or ammunition business and the gambling business. Each of the three types of business are usually intertwined. Therefore, drug abuse is usually performed and controlled by organized crime, i.e. the Group (usually called the syndicate, mobsters, cartels) already well established in the Organization structure and funding.

Drugs is a rivalry between countries globally, because the war at this point is no longer about arms war, but rather the psychological war for resource control of certain countries. Indirectly drug distribution that will benefit the strong country and weaken to colonize the resources in other countries. According to WHO data drug compactor in the world has reached 190 million people.

While drug users (end user) in Indonesia is likely to experience increasing trend from year to year totaled 3.8 million in 2010. Cited from the data BNN, is estimated prevalence (incidence) of drug abuse in Indonesia will reach about 5.1 million people in 2015. If the trend of consistent increases, the estimated 2015 figure may

increase double to about 10 million people and is quite alarming is the large number of drug users from among the student.

Indonesia currently faced with the loss of generation or loss phase generation, where Indonesia has been in a state of drugs emergency. The young people should take advantage of his working life on the positive things, because they are the progress of a nation determinants. If the youth of a nation are already occupied and mentally destroyed by drugs then the country would be easily colonized. Drug is an enemy that requires special treatment attention and support from all stakeholders, ranging from government to families.

Zero Drug Program

The threat of narcotics crime has become a threat to national security, and handling is required in an integrated collaboration involving all components of the nation. As is known, beyond the year 2015 countries in Asia are determined to free their country from the drug, and was declared Indonesia Zero Drug Program.

Drugs are one of the threats to national security and is not spared from the attention of the Ministry of Defence to support and cooperate with the National Narcotics Agency (BNN) in the form of a memorandum of

Indonesia "ZERO DRUGS" Campaign





komponen bangsa. Seperti diketahui, pada tahun 2015 nanti negara-negara di Asia bertekad membebaskan Negara masing-masing dari narkoba, dan Indonesia sudah mencanangkan Program Zero Narkoba.

Narkoba adalah salah satu ancaman keamanan nasional dan ini tidak luput dari perhatian Kementerian Pertahanan untuk mendukung dan berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam bentuk nota kesepahaman untuk memberantas narkoba di Indonesia. Program tersebut dimaksudkan untuk memacu pemberantasan narkoba secara simultan. Pihak terkait yang disertai tanggungjawab dalam Program Zero Narkoba adalah Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan jajaran Penegak Hukum lainnya. Namun demikian program tersebut tidak mungkin terwujud tanpa jalinan kerjasama yang solid semua pihak terkait, termasuk Kemhan dan TNI.

Sebagai langkah nyata mencegah dan memerangi kejahatan narkoba serta menyelamatkan prajurit TNI, PNS Kemhan, keluarga, masyarakat, dan bangsa dari kejahatan narkoba, Kemhan dan Badan Narkotika Nasional sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan saling bahu-membahu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba pada prajurit TNI, PNS Kemhan dan seluruh komponen bangsa. Kerjasama ini merupakan langkah nyata mencegah dan memerangi kejahatan narkoba serta menyelamatkan prajurit TNI, PNS Kemhan, keluarga, masyarakat dan bangsa dari kejahatan narkoba.

Kesepakatan kerjasama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar di Kantor Kemhan Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014. Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai landasan kerjasama Kemhan dan BNN dalam rangka membangun kerjasama yang sinergis mengenai P4GN. Sedangkan tujuannya adalah terjalinnya kerjasama dan sinergitas Kemhan dan BNN dalam pelaksanaan mengenai P4GN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ruang lingkup MoU meliputi diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor bagi pencandu, korban penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika, pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan Kemhan dan BNN, serta pelaksanaan pemeriksaan tes atau uji narkoba.

Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Rehabilitasi di lingkungan Kemhan. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Laksda TNI Agus Purwoto dengan Deputi Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan menyelenggarakan

understanding to combat drugs in Indonesia. The program is intended to accelerate drug eradication simultaneously. Related parties entrusted with the responsibility of Zero Drug Program is the National Narcotics Agency, police and other law enforcement ranks. However, the program is not possible without a solid fabric of cooperation of all parties concerned, including the Ministry of Defense and Armed Forces.

As concrete steps to prevent and combat drug crime and saving the soldiers, the Ministry of Defense civil servants, family, community, and nation from drug crimes, the Ministry of Defense and the National Narcotics Agency agreed to cooperate on the Prevention and Combating Abuse and Illicit Narcotics and Narcotics Precursor (P4GN) with each other and work together to prevent and combat illicit trafficking of narcotic abuse on soldiers, civil servants and all components of the nation's Ministry of Defense. This cooperation is a real step to prevent and combat drug crime and saving the soldiers, Ministry of Defense civil servants, families, communities and nations from drug-related crimes.

Cooperation agreement was contained in a Memorandum of Understanding (MOU) signed by the Minister of Defence, Yusgiantoro and Chief BNN, Police Commissioner General Anang Iskandar at the Ministry of Defense office in Jakarta, on Friday, March 28, 2014. Memorandum of Understanding is the foundation of the Ministry of Defense and BNN partnership in order to build on the synergistic P4GN cooperation. While the goal is the establishment cooperation and synergy of the Ministry of Defense and BNN in implementing P4GN to embody Indonesian society which is free from abuse and illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursor.

The scope of the MoU include the dissemination of information and advocacy on the Prevention and Combating Abuse and Illicit Narcotics and Narcotics Precursor (P4GN), as well as development and community empowerment of anti-abuse and illicit traffic in narcotic drugs and precursors. In addition, the implementation of compulsory addicts reporting socialization, victims of drug abuse and drug precursors, environmental rehabilitation at the Ministry of Defense and BNN, and the conduct of the test or drug test.

Memorandum of Understanding is then followed by the Rehabilitation Services of Cooperation Agreement in the Ministry of Defense. Cooperation agreement signed by the Defence Strength Director General of the Ministry of Defence, Rear Admiral TNI Agus Purwoto with Deputy

Rehabilitation BNN, Diah Setia Utami. Cooperation Agreement is intended as the foundation in carrying out rehabilitation services in the Ministry of Defense, with the aim of achieving an increase P4GN programs especially in the field of rehabilitation in the Ministry of Defence.

The scope of cooperation includes the implementation of mandatory reporting program socialization and rehabilitation for addicts and drug abusers or victims, facilitating drug rehabilitation program to the rehabilitation officers in the Ministry of Defence. This program is in the form of capacity building and facilitation of drug rehabilitation programs for addicts and drug abusers or victims, good medical rehabilitation, social rehabilitation, and post-rehabilitation.

The prevalence of drug users continues to increase to four million more. In fact that could be rehabilitated only about 2,000 people. To the cooperation with the Ministry of Defence, where the hospital dr. Suyoto which is under the Ministry of Defence was badly needed as the rehabilitation of addicts.

Drug Awareness Campaign in the TNI environment

KOSTRAD 323 Raider Battalion personnel enlightened on narcotics and illegal drugs by the National Narcotics Agency (BNN). The event, which took place on Monday, March 11, 2014 was held from 09.00 pm and held in the hall of Strategic Reserve Command 323 Battalion.

In this counseling time, the speaker expressed about the types of narcotics and illegal drugs circulating in the community. Including the new type of drug that is used by one of the celebrities in Indonesia. In addition to explaining the types of drugs, representatives of BNN also explains the dangers or the impact if a person consumes drugs. The most dangerous is the impact of loss of lives for those who consume drugs.

Counseling about the drug's activity is a form of personnel development (Binpers) performed by Kostrad 323 Infantry Battalion. Given Drugs circulation currently are very vibrant in the community. In the Army neighborhood itself there is quite a lot of drug case which afflict soldiers or civil servants. Therefore, to avoid such matters the Intelligence Staff work with BNN, Banjar Metro Police, Banjar City and Military Police Sub-detachment maintain this Awareness Campaign activities.



pelayanan rehabilitasi di lingkungan Kemhan, dengan tujuan tercapainya peningkatan program P4GN khususnya di bidang rehabilitasi di lingkungan Kemhan.

Ruang lingkup kerjasama meliputi pelaksanaan sosialisasi program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu dan atau korban penyalahguna narkoba, fasilitasi program rehabilitasi narkoba bagi petugas pelaksana rehabilitasi di lingkungan Kemhan dalam bentuk capacity building dan fasilitasi program rehabilitasi narkoba bagi pecandu dan atau korban penyalahguna narkoba, baik rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, maupun pasca rehabilitasi.

Prevelansi pengguna narkoba terus meningkat mencapai empat juta lebih. Padahal yang bisa di rehabilitasi hanya sekitar 2.000 orang. Adanya kerjasama dengan Kemhan, dimana rumah sakit dr. Suyoto yang berada dibawah Kemhan memang sangat dibutuhkan sebagai tempat rehabilitasi para pecandu.

Penyuluhan Narkoba di Lingkungan TNI

Personel Batalyon Infanteri 323 Raider Kostrad mendapatkan pencerahan mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan yang berlangsung pada hari senin tanggal 11 Maret 2014 ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan di aula Yonif 323 Kostrad.

Dalam penyuluhan kali ini, pembicara

mengutarakan mengenai jenis-jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang beredar di masyarakat. Termasuk jenis narkoba baru yang digunakan oleh salah satu selebritis di Indonesia. Selain menjelaskan mengenai jenis-jenis Narkoba, perwakilan dari BNN juga menjelaskan mengenai bahaya atau dampak yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi Narkoba. Dampak yang paling berbahaya adalah hilangnya nyawa bagi mereka yang mengkonsumsi Narkoba.

Kegiatan penyuluhan mengenai narkoba ini merupakan salah satu bentuk Pembinaan Personil (Binpers) yang dilakukan oleh Batalyon Infanteri 323 Kostrad. Mengingat saat ini peredaran Narkoba di masyarakat sudah sangat marak. Di lingkungan Angkatan Darat sendiri sudah cukup banyak kasus Narkoba yang menimpa Prajurit maupun PNS. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut Staf Intelijen bekerjasama dengan BNN, Polresta Banjar, dan Subdenpom Kota Banjar menyelenggarakan kegiatan penyuluhan ini.



Sumber : tniad.mil.id





